



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA, DAN
LUAS LAHAN DI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB DI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2015**

SKRIPSI

Oleh
Karina Via Rizqi
NIM 140810101139

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA, DAN
LUAS LAHAN DI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB DI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2015**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
Karina Via Rizqi
NIM 140810101139

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap segala puji syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurah bagi baginda Rasulullah SAW, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Muhammad Suharto dan Ibunda Kartini tercinta yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan semangat dan kasih sayang serta pengorbanan selama ini.
2. Kakak - kakakku tersayang Lailina Ulfa, Sanny Puspitasari, Erma Yulianingsih, Bayu Sugara yang telah memberikan perhatian, kasih sayang sepenuh hati dan dukungan moral selama ini.
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Selalu berbuat baiklah terhadap semua orang sekalipun orang yang jahat kepadamu karena menjadi orang baik tidak pernah ada ruginya.”

(Muhammad Suharto)

“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri”

(Benyamin Franklin)

“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, kau harus menciptakannya”

(Chris Grosser)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Karina Via Rizqi

NIM : 140810101139

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Luas Lahan di Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Oktober 2018

Yang menyatakan,

Karina Via Rizqi
NIM 140810101139

SKRIPSI

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA, DAN
LUAS LAHAN DI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB DI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2015**

Oleh

Karina Via Rizqi

NIM 140810101139

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Badjuri, M.E.

Dosen Pembimbing II : Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Luas Lahan di Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015.
Nama Mahasiswa : Karina Via Rizqi
NIM : 140810101139
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Regional
Tanggal Persetujuan : 17 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Badjuri, M.E.
NIP. 195312251984031002

Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E.
NIP. 197806162003122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes.
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA, DAN
LUAS LAHAN DI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB DI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2015.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Karina Via Rizqi

NIM : 140810101139

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

2 November 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Endah Kurnia Lestari, S.E., M.E. (.....)
NIP. 197804142001122003
2. Sekretaris : Drs. Petrus Edi Suswendi, M.P. (.....)
NIP. 195504251985031001
3. Anggota : Dr. Moh. Adenan, M.M. (.....)
NIP. 196610311992031001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Foto 4 x 6
Warna

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak,CA.

NIP. 19710727 199512 1 001

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA, DAN
LUAS LAHAN DI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB DI PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2010-2015**

Karina Via Rizqi

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan ekonomi dapat ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi yang terbilang tinggi dan berkelanjutan. Diperlukan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang ada pada suatu daerah tidak lepas kaitannya dengan pembangunan nasional, dimana sasaran pembangunan nasional menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada setiap daerah dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik itu pada tingkat kabupaten atau kota maupun tingkat provinsi. Salah satu komponen yang terdapat dalam permintaan agregat (*agregat demand/AD*) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori menyatakan apabila pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan maka (*AD* atau *agregat demand*) akan mengalami peningkatan juga, dengan adanya peningkatan (*AD* atau *agregat demand*) berarti telah terjadi pertumbuhan ekonomi. Dalam proses pembangunan suatu daerah pengeluaran pemerintah melalui kebijakan diperlukan untuk mengatasi masalah yang tidak bisa diatasi oleh pihak swasta, salah satunya yaitu pada sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu variabel pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, dan luas lahan di sektor pertanian terhadap variabel PDRB Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini berfokus menggunakan metode *Panel Least Square* (PLS) dengan periode tahun penelitian 2015-2016. Estimasi dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda pada setiap variabel pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, dan luas lahan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur. Sesuai hasil estimasi PLS variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB. Sementara itu, hasil estimasi variabel tenaga kerja sektor pertanian memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap PDRB. Sedangkan luas lahan memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB.

Kata kunci: *Gross Domestic Regional Product* (GDRP), *Government Expenditure*, *Labor*, *Land Area Agricultural Sector*, *PLS*.

The Influence of Government Expenditure, Labor, and Land Area in the Agricultural Sector Against GDRP in East Java Province 2010-2015

Karina Via Rizqi

Department of Economics and Development Studies, Faculty Economics and Business, University of Jember

ABSTRACT

The success of a region in economic development can be shown through a relatively high economic growth and sustainable. It takes the right policy objectives and sustainable in order to accelerate the development and welfare of society. Economic development in a region not loose relation to national development, which was a national goal of creating economic growth and equitable development. Economic growth that occurred in each area can be measured through the Gross Domestic Regional Product (GRDP) be it at the level of the county or city or provincial level. One of the components contained in the aggregate demand (aggregate demand/AD) was government spending. In theory stated in government spending has increased then (AD or aggregate demand) will experience increased as well, with an increase in (AD or aggregate demand) means economic growth has occurred. In the process of the construction government spending through the policies needed to address issues that cannot be addressed by private parties, one of them in the agricultural sector. This research to know the relationships of variables independent of the dependent variable. variabel Government Expenditure, labor, and land area in agriculture sectors, in the variable GDRP of East Java province. This research focus using the method of Panel Least Square (PLS) with a period of 2015-2016 years of research. Estimates in this study showed different results on each variable expenses of Government Expenditure, labor, and land area of agricultural sector against a GDRP of East Java province. According the results of the estimation variable PLS Government spending agriculture sector has a positive and significant effect against the GDRP. Estimation of the agricultural labour force variable has a negative and significant effect against the GDRP. While the land area have a positive but not significant to GDRP.

Keywords: *Gross Domestic Regional Product (GDRP), Government Expenditure, Labor, Land Area Agricultural Sector, PLS.*

RINGKASAN

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Luas Lahan di Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015;Karina Via Rizqi, 140810101139; 2018; halaman; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan ekonomi dapat ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi yang terbilang tinggi dan berkelanjutan. Diperlukan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang ada pada suatu daerah tidak lepas kaitannya dengan pembangunan nasional, dimana sasaran pembangunan nasional itu sendiri yakni menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada setiap daerah dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik itu pada tingkat kabupaten atau kota maupun tingkat provinsi.

Salah satu komponen yang terdapat dalam permintaan agregat (*agregat demand/AD*) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori menyatakan apabila pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan maka (*AD* atau *agregat demand*) akan mengalami peningkatan juga, dengan adanya peningkatan (*AD* atau *agregat demand*) berarti telah terjadi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000). Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah digunakan dalam pembelian barang maupun jasa pada suatu sektor. Sektor-sektor yang memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, salah satunya yakni pada sektor pertanian. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pertanian merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui anggaran belanjanya untuk

pembangunan di sektor pertanian. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian ditunjukkan dengan jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan untuk sektor pertanian.

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lainnya di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan produksi ini akan meningkatkan kebutuhan input tenaga kerja, sehingga akan memperluas penyerapan kesempatan kerja. Menurut Ruliansyah (2012), jumlah PDRB yang meningkat menggambarkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menggambarkan pertumbuhan jumlah proyek dan jumlah kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh pasar yang memberikan respon positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Naiknya pendapatan perkapita dalam hal ini bisa berarti naiknya jumlah serapan tenaga kerja. Luas lahan yang digunakan dalam kegiatan pertanian yaitu lahan yang masih produktif, dimana lahan masih memiliki tingkat kesuburan guna menunjang produksi pada sektor pertanian. Sehingga dengan adanya luas lahan yang masih produktif maka aktivitas pada sektor pertanian dapat dikembangkan dan menunjang produktivitas pada sektor pertanian yang akan menaikkan PDRB pada daerah tersebut melalui sektor pertanian. Luas lahan yang digunakan dalam sektor pertanian terdiri atas luas lahan sawah, luas lahan tegal atau kebun, luas lahan ladang atau huma, dan lahan sementara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, dan luas lahan di sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode *Panel Least Square* (PLS). Penggunaan metode PLS. Hasil analisis *Panel Least Square* (PLS) pada Provinsi Jawa Timur dalam penelitian ini menunjukkan hubungan yang berbeda pada masing-masing variabel.

Dimana variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PDRB, variabel tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel PDRB, dan variabel luas lahan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB.

PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya serta sholawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atas petunjuk kebenaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Luas Lahan di Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik motivasi, nasehat, dorongan, kasih sayang dan kiritik yang membangun. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Badjuri, M.E. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing, memberikan pemahaman tentang sektor pertanian sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi. Terima kasih pula telah menjadi pembimbing yang sabar dalam memahami penulis selama proses penyusunan skripsi;
2. Ibu Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing, dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala motivasi serta kritik dan saran yang membangun demi kelancaran penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes. selaku Ketua dan Dr. Lilis Yuliaty, S.E., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Jember;

5. Ibu Dr. Regina Niken W., S.E. selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Perpustakaan Pusat;
7. Ayahanda Muhammad Suharto dan Ibunda Kartini, terima kasih yang tak terhingga atas segala doa tulus ikhlas yang selalu mengiringi demi kesuksesan ananda. Terimakasih telah menjadi motivator terbesar dalam hidup ananda, yang selalu menjadi alasan untuk terus berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan tetap merasa bersyukur;
8. Kakak – kakakku Lailina Ulfa, Sanny Puspitasari, Erna Yulia Ningsih, Bayu Sugara sebagai sosok yang memberikan dukungan semangat, nasehat, motivasi.
9. Sahabat-sahabatku yang telah menjadi keluarga kedua selama di Jember, terima kasih untuk Elvin, Diyah, Rini, Silmi, Desi, Rola, Tanti, Titi, Rusvita yang telah menjadi *partner* dalam segala hal dari awal perkuliahan hingga akhir.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata tidak ada yang sempurna di dunia, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis karya tulis selanjutnya. Aamiin.

Jember, 17 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
RINGKASAN.....	xi
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Masalah.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	12
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto.....	15
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.1.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.1.5 Pengelompokan Pengeluaran Pemerintah.....	20
2.1.6 Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB.....	21
2.1.7 Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap PDRB.....	22

2.1.8	Teori David Ricardo.....	22
2.1.9	Lahan.....	24
2.1.10	Pengaruh Luas Lahan Terhadap PDRB.....	28
2.2	Penelitian Terdahulu.....	29
2.3	Kerangka Konseptual.....	36
2.4	Hipotesis Penelitian.....	38
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Rancangan Penelitian.....	39
3.1.1	Jenis Penelitian.....	39
3.1.2	Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
3.1.3	Jenis dan Sumber Data.....	39
3.2	Desain Penelitian.....	40
3.3	Metode Analisis Data.....	41
3.3.1	Analisis Regresi Data Panel.....	41
3.3.2	Uji Pemilihan Data Panel.....	42
3.3.3	Uji Statistik.....	45
3.3.4	Uji Asumsi Klasik.....	47
3.4	Definisi Variabel Operasional.....	49
BAB 4. PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum.....	51
4.1.1	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian.....	52
4.1.2	Tenaga Kerja Sektor Pertanian.....	53
4.1.3	Luas Lahan Sektor Pertanian.....	55
4.1.4	PDRB.....	56
4.2	Hasil Analisis Data.....	57
4.2.1	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Luas Lahan di Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015.....	57
4.2.2	Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	59
4.2.3	Hasil Uji Statistik.....	61
4.2.4	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	62

4.3 Pembahasan	65
4.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB	66
4.3.2 Pengaruh Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Terhadap PDRB	68
4.3.3 Pengaruh Luas Lahan di Sektor Pertanian Terhadap PDRB	69
BAB 5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016(dalam Persen).....	3
Tabel 1.2 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015.....	4
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Berbagai Sektor di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2017 (jiwa).....	7
Tabel 1.4 Luas Lahan Sawah, Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan lahan sementara yang diusahakan di Provinsi Jawa Timur 2010-2016 (ha).....	8
Tabel 4.1 Luas Lahan Sawah, Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan lahan sementara yang diusahakan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015 (ha).....	55
Tabel 4.2 Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i> Variabel Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Luas Lahan Sektor Pertanian Terhadap PDRB.....	58
Tabel 4.3 Hasil Chow test untuk menentukan model <i>common effect</i> atau <i>fixed effect</i>	60
Tabel 4.4 Hasil Hausman Test untuk menentukan model <i>Fixed Effect</i> atau <i>Random Effect</i>	60
Tabel 4.5 Hasil Uji T Pada Model Regresi Data Panel.....	62
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas Pada Model Regresi.....	63
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi Pada Model Regresi.....	64
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Pada Model Regresi.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015 (miliar rupiah).....	5
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	37
Gambar 3.2 Bagan Desain Metode Penelitian.....	40
Gambar 4.1 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015 (miliar rupiah).....	53
Gambar 4.2 Penduduk Yang Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja di Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015 (juta jiwa).... .	54
Gambar 4.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015 (ribu rupiah).....	57
Gambar 4.4 Gambar Uji Normalitas.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

A. Data Log PDRB, Log Pengeluaran Pemerintah, Log Tenaga Kerja, Log Luas Lahan Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015.....	77
B.1 Fixed Effect Model.....	83
C.1 Uji Chow	84
C.2 Uji Hausman Test.....	85
D.1 Uji normality test.....	86
D.2 Uji Multikolinearitas.....	86
D.3 Uji Autokorelasi.....	87
D.4 Uji Heteroskedastisitas.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad dalam Azzumar, 2011). Sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah dengan menggali potensi-potensi yang ada pada daerah tersebut. Diperlukan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek sehingga tepat dengan sasaran pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi yang ada pada suatu daerah tidak lepas kaitannya dengan pembangunan nasional, dimana sasaran pembangunan nasional itu sendiri yakni menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pembangunan ekonomi menurut Todaro (2000) merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut, pembangunan ekonomi tersebut mencakup berbagai aspek-aspek pembentuk seperti ekonomi, sosial, politik dan lainnya dimana aspek-aspek tersebut saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan pembangunan baik ditingkat pusat maupun daerah. Menurut Djojohadikusumo (1993) dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana prasarana produksi. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya diindikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada setiap daerah dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik itu pada tingkat kabupaten atau kota maupun tingkat provinsi. Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami perubahan, dimana era sentralistik berubah menjadi era desentralisasi. Pelaksanaan UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang desentralisasi fiskal kemudian direvisi oleh UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004 mengenai hal yang sama, terdapat perubahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dikenal dengan otonomi daerah. Dimana daerah diberikan kekuasaan dalam mengelola keuangan dan meningkatkan potensi kekayaan yang dimiliki masing-masing daerah.

Badan Pusat Statistik (2015) menyebutkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Salah satu komponen yang terdapat dalam permintaan agregat (*agregat demand/AD*) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori menyatakan apabila pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan maka (*AD* atau *agregat demand*) akan mengalami peningkatan juga, dengan adanya peningkatan (*AD* atau *agregat demand*) berarti telah terjadi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Didalam teori ekonomi makro disebutkan dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto yakni merupakan penjumlahan dari berbagai variabel termasuk didalamnya pengeluaran pemerintah. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, atau lebih umumnya ukuran dari sektor

publik, merupakan pengeluaran pemerintah yang dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Suherman, 2012).

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2017 (dalam persen)

No	Tahun	Provinsi						Indonesia
		Jakarta	Jawa Barat	Banten	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	
1	2010	6.5	6.2	6.08	5.48	4.88	6.68	35.82
2	2011	6.73	6.51	6.38	6.03	5.17	6.44	37.26
3	2012	6.53	6.28	6.15	6.34	5.32	6.64	37.26
4	2013	6.11	6.06	5.86	5.81	5.4	6.08	35.32
5	2014	5.95	5.07	5.47	5.42	5.2	5.86	32.97
6	2015	5.88	5.03	5.37	5.44	4.95	5.44	32.07
7	2016	5.86	5.67	5.26	5.28	5.05	5.55	32.67
8	2017	6.22	5.29	5.71	5.27	5.26	5.45	33.2
Rata-rata		6.22	5.83	5.79	5.68	5.13	6.09	34.76

Sumber: BPS, Statistika Indonesia berbagai tahun, data diolah.

Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Jawa dalam kurun waktu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 34.56 %. Dimana Provinsi DKI Jakarta berada pada urutan pertama dengan pertumbuhan ekonomi dalam 8 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai tahun 2017 sebesar 6.22 %. Diurutan kedua yaitu Provinsi Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 sampai 2017 sebesar 6.09 %. Diurutan ketiga yaitu Provinsi Jawa Barat dengan pertumbuhan dari tahun 2010 sampai 2017 ekonomi sebesar 5.83 %. Selanjutnya diurutan keempat yaitu Provinsi Banten dengan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 sampai 2017 sebesar 5.79 %. Diurutan kelima yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 sampai 2017 sebesar 5.68 %. Dan diurutan keenam yaitu Provinsi DI Yogyakarta dengan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 sampai 2017 sebesar 5.13 %.

Tabel 1.2 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Jawa Timur Tahun 2010-2015 (dalam persen)

Tahun	Kontribusi Sektor Pertanian (persen)
2010	15.75
2011	15.38
2012	14.38
2013	14.91
2014	15.63
2015	13.75

Sumber: Statistika Indonesia, 2010

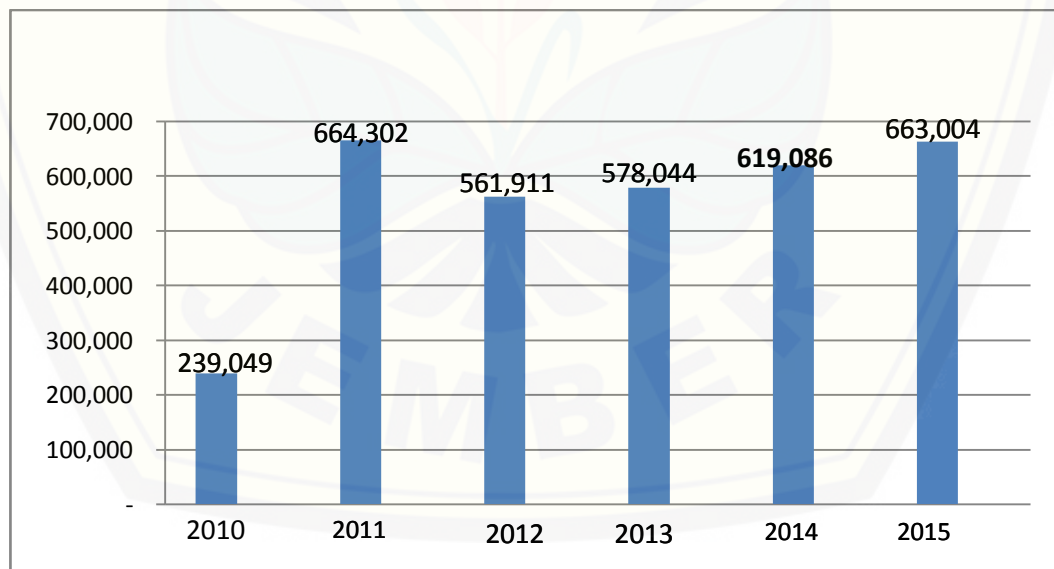
Pada tabel 1.2 tahun 2010 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 15,75 persen. Memasuki tahun berikutnya, yakni pada tahun 2011, kontribusi pertanian terhadap PDRB kembali turun menjadi 15,38 persen. Angka kontribusi tersebut mampu dipertahankan pada tahun 2012, namun penurunan kembali terjadi pada tahun 2013 menjadi 14.91 persen, dan ditahun 2015 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB semakin menurun menjadi 13.75 persen. Kondisi ini kemungkinan terjadi dikarenakan akibat dari semakin minimnya jumlah tenaga kerja yang tertarik pada sektor pertanian, dan semakin banyak pula lahan pertanian yang mengalami alih fungsi.

Provinsi Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota yang tersebar di wilayah Jawa Timur dengan ibukota Surabaya. Terdiri dari kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Situbondo, Trenggalek, Tuban, Tulungagung. Dan 9 kota yakni kota Batu, Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya. Jawa Timur memiliki luas wilayah daerah 157.922 Km² memiliki potensi sumber daya alam diberbagai sektor meliputi perindustrian, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan pariwisata. Pada sektor pertanian Jawa Timur, memiliki potensi berupa lahan yang cukup luas dan iklim yang mendukung, untuk mengembangkan produk pangan.

Saat ini Luas lahan sawah yang berada di Jawa Timur adalah 1.178.283 ha, terdiri dari lahan beririgasi seluas 907.274 ha, sawah tadah hujan seluas 243.899 ha, dan sawah lainnya/irigasi desa seluas 27.110 ha.

Pertanian yang ada di Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi besar pada sektor pangan dan agribisnis. Secara nasional Jawa Timur merupakan pemasok pangan yang terbatas sehingga kegiatan pertanian merupakan suatu lapangan usaha yang menentukan dalam struktur perekonomian Jawa Timur. Hal ini menunjukkan Jawa Timur dalam perekonomian memperlihatkan perkembangan dimana perkembangan industri dan jasa akan didukung oleh pertanian yang tangguh, melihat potensi perkembangan dan pengembangan dimasa mendatang. Lapangan usaha pertanian yang berada dalam struktur perekonomian Jawa Timur masih memiliki peran penting dimana terlihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur. Selain berperan dalam perekonomian, pertanian juga mampu berperan terhadap stok pangan Nasional.

Grafik 1.1 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015 (miliar rupiah)



Sumber: APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, data diolah.

Grafik 1.1 menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur. Pengeluaran pemerintah dalam sektor pertanian mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2010 ke tahun 2011, kemudian mengalami

penurunan di tahun 2012, tetapi mulai dari tahun 2013 hingga 2015 pengeluaran pemerintah sektor pertanian terus mengalami kenaikan. Peningkatan pengeluaran pembangunan untuk sektor pertanian adalah merupakan hal yang sangat penting, sebab sektor pertanian mencakup sebagian besar angkatan kerja pedesaan di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Hal ini juga di kemukakan oleh Yudhoyono (2004) bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan non-pertanian.

Menurut Mankiw (2012) pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja, masalah ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia cukup kompleks seperti masalah kualitas tenaga kerja yang rendah, upah, jaminan sosial, dan lain-lain. Dengan adanya masalah ketenagakerjaan yang kompleks tersebut disini sektor pertanian masih memiliki peran dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian di Indonesia sampai saat ini masih memiliki peran penting berdampingan dengan sektor lainnya seperti sektor industri dan sektor lainnya. Pada kenyataannya sebagian besar masyarakat masih menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Tidak dapat dipungkiri perkembangan kota dan pemukiman yang semakin meluas mengabitkan alih fungsi lahan pertanian sudah mulai tergeser. Dimana banyak lahan-lahan pertanian sudah tidak digunakan sebagai fungsi lahan pertanian melainkan digunakan sebagai pemukiman dan lain sebagainya. Hal ini mendorong para pekerja dibidang pertanian memiliki pilihan untuk beralih profesi dalam bidang non pertanian atau membuka lahan pertanian yang baru.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Berbagai Sektor di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2017 (jiwa).

No	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	7 939 480	7 743 448	7 696 993	7 411 285	7 261 367	7 083 252	6 975 568	6 713 893
2	133 892	134 350	144 683	121 951	143 338	125 813	135 184	158 435
3	2 482 563	2 562 752	2 864 864	2 779 265	2 776 552	2 699 676	2 765 288	3 016 837
4	25 665	23 383	31 106	28 700	35 849	29 217	32 530	55 908
5	894 648	1 128 335	1 250 444	1 047 454	1 259 443	1 510 085	1 469 473	1 423 169
6	3 787 780	3 658 077	3 887 752	4 101 445	4 026 671	4 121 312	4 016 808	4 580 393
7	755 583	693 175	679 999	681 173	686 972	636 150	697 714	699 981
8	232 000	340 275	348 874	344 795	421 788	410 912	422 899	503 394
9	2 446 497	2 321 071	2 506 541	3 037 842	2 694 528	2 751 360	2 599 099	2 947 210

Sumber: BPS 2017 Jawa Timur, diolah.

Keterangan sektor:

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air
5. Bangunan
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel
7. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan perorangan

Tabel 1.3 memperlihatkan lapangan pekerjaan utama yang diminati oleh masyarakat Jawa Timur pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Dimana posisi pertama ditempati oleh sektor pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan perikanan, kemudian yang kedua ditempati oleh sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel, dan ketiga ditempati oleh sektor industri pengolahan, disusul oleh sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan perorangan, kemudian pada sektor Bangunan, kemudian pada sektor Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, disusul oleh sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan, dan terakhir ditempati oleh sektor Listrik, Gas, dan Air. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki

penyerapan tenaga kerja yang cukup besar di Provinsi Jawa Timur dimana masyarakat masih memiliki minat yang cukup besar untuk bekerja di sektor pertanian dibandingkan dengan sektor lainnya.

Tabel 1.4 Luas Lahan Sawah, Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan lahan sementara yang diusahakan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016 (ha)

Tahun	Sawah	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Lahan Sementara	Jumlah
2010	1.229.838	1.114.530	44.312	10.786	2.339.466
2011	1.112.110	1.103.984	37.048	10.813	2.263.955
2012	1.224.841	1.128.083	37.331	10.814	2.401.069
2013	1.179.264	1.141.452	37.520	15.270	2.373.506
2014	1.177.160	1.131.176	37.439	11.994	2.357.769
2015	1.091.752	1.112.267	43.785	12.678	2.260.482
2016	1.087.017	1.103.983	59.047	18.650	2.268.697

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah.

Tabel 1.4 merupakan data yang menunjukkan luas lahan pertanian hektar are (ha) yang ada di Provinsi Jawa Timur tahun 2010 sampai tahun 2016. Lahan pertanian terdiri atas lahan sawah, lahan tegal/kebun, lahan ladang/huma, dan lahan sementara. Untuk lahan sawah dalam tujuh tahun terakhir yaitu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 menurut tabel 4.1 mengalami penurunan, di tahun 2016 sebesar 1.087.017 (ha). Untuk lahan tegal/kebun sempat mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 tetapi kemudian terjadi penurunan ditahun berikutnya yaitu pada tahun 2015, pada tahun 2016 luas lahan tegal atau kebun juga mengalami penurunan dan di tahun 2016 sebesar 1.103.983 (ha). Untuk lahan ladang atau huma mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tetapi pada tahun 2015 dan 2016 ladang atau huma mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai sebesar 43.785 (ha) dan 59.047 (ha). Sedangkan untuk lahan sementara rata-rata mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, kemudian terjadi penurunan di tahun 2014 sebesar 11.994 (ha), dan terjadi kenaikan di tahun 2015 dan 2016.

Sektor pertanian di Indonesia masih merupakan sektor unggulan yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang terserap pada sektor pertanian. Pembangunan yang semakin berkembang berdampak pada beresernya lahan pertanian dimana konservasi lahan banyak

digunakan untuk perkembangan industri, perumahan dan lain sebagainya. Akibatnya lahan pertanian secara terus menerus mengalami konversi lahan atau alih fungsi ke pertanian. Padahal lahan pertanian menjadi salah satu kunci pokok sebagai penyangga kebutuhan pangan (Hariyanto, 2010). Konservasi lahan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja melainkan juga sampai ke pelosok desa, konservasi lahan memberikan dampak yang sangat luas dari segi sosial, ekonomi dan budaya. (Irawan dan Friyanto, 2001).

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah berupa suatu tindakan pemerintah dalam mengatur jalanya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah . Pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah digunakan dalam pembelian barang maupun jasa pada suatu sektor. Sektor-sektor yang memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, salah satunya yakni pada sektor pertanian. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pertanian merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui anggaran belanjanya untuk pembangunan di sektor pertanian. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian ditunjukkan dengan jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan untuk sektor pertanian melalui APBN atau APB. Pengeluaran pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan. Pengeluaran pemerintah dapat berperan sebagai penggerak utama perekonomian, sehingga ketika perekonomian mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi, pemerintah melalui instrument kebijakan dapat menyelamatkan keadaan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah melalui anggaran belanjanya (Abdul Halim, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Kondisi perekonomian di daerah Jawa Timur yang cukup stabil, belum tentu dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Agar perekonomian tetap dalam kondisi yang stabil, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus tepat dan efektif. Kajian diatas, dapat ditarik rumusan masalah antara lain:

1. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap PDRB Di Provinsi Jawa Timur?
2. Seberapa besar pengaruh tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian terhadap PDRB Di Provinsi Jawa Timur?
3. Seberapa besar pengaruh luas lahan pertanian terhadap PDRB provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap PDRB Di Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja di sektor pertanian terhadap PDRB Di Provinsi Jawa Timur.
3. Mengetahui pengaruh luas lahan pertanian terhadap PDRB Di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

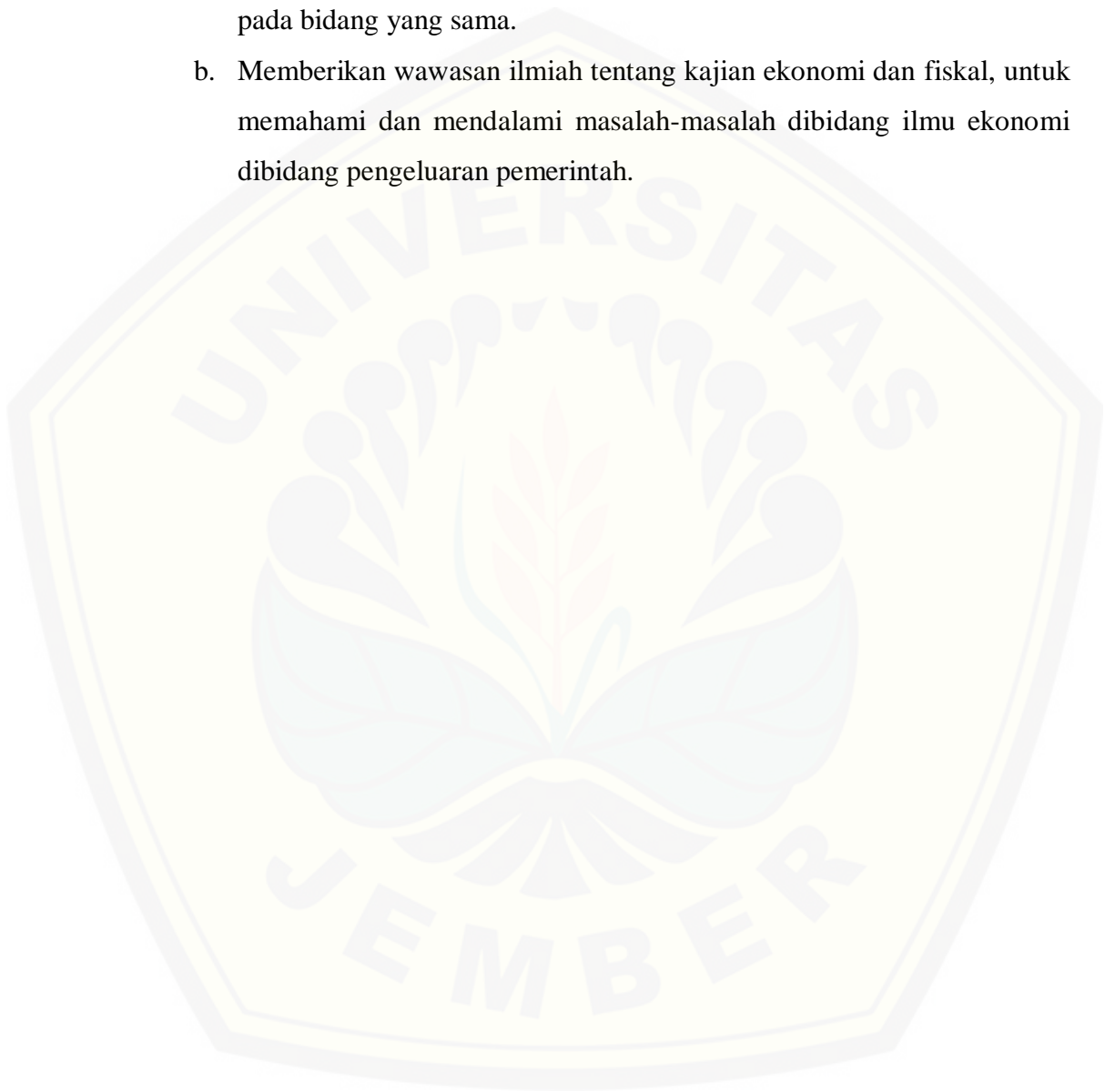
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka terdapat manfaat yang dapat diambil oleh pihak terkait atau masyarakat sehubungan dengan bahasan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah, tenaga kerja di sektor pertanian dan luas lahan pertanian terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi lembaga pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan, khususnya

berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi kepada penelitian selanjutnya mengenai kajian pada bidang yang sama.
- b. Memberikan wawasan ilmiah tentang kajian ekonomi dan fiskal, untuk memahami dan mendalami masalah-masalah dibidang ilmu ekonomi dibidang pengeluaran pemerintah.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yaitu penambahan output atau penambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun (Prasetyo, 2009). Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi disini berarti mengukur peningkatan dan perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumsinya. Perekonomian dikatakan mengalami peningkatan atau pertumbuhan apabila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dibandingkan dengan pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Dimana pertumbuhan ekonomi dilihat dari adanya perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai akhir pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun) dalam tingkat nasional. Sedangkan untuk tingkat daerah atau kabupaten atau kota disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB maupun PDRB dapat diukur melalui tiga pendekatan yakni dengan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Dimana pendekatan produksi dan pendekatan pendapatan dari sisi penawaran agregat (*aggregate*

supply) sedangkan untuk pendekatan pengeluaran berasal dari sisi permintaan agregat (*aggregate demand*).

Salah satu indikator makro ekonomi untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah pada periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi.

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik (Adam Smith)

Tokoh terkenal dari ekonomi klasik adalah Adam Smith merupakan ahli ekonomi klasik, dimana tujuan utama Smith dalam menegakkan ilmu ekonomi adalah pembangunan masyarakat melalui pembangunan ekonomi. Dalam bukunya *An Inquiry into the Natural and Causes of the Wealth of Nation* (1776) ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang sistematis. Inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith adalah terdapat dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

a. Pertumbuhan Output Sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu:

- (1) Sumber daya alam (faktor produksi tanah)
- (2) Sumber daya manusia (jumlah penduduk)
- (3) Stok kapital yang tersedia.

b. Pertumbuhan Penduduk

Yaitu mengenai peranan pentingnya penduduk didalam pembangunan ekonomi, Adam Smith memiliki pendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2010).

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik (Harrod Domar)

Teori pertumbuhan Harrod-Domar adalah pengembangan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Karena pada aliran Keynesian dianggap kurang rinci karena tidak membicarakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Dalam teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam jangka panjang (Arsyad, 1999). Dalam teori ini ada beberapa asumsi yaitu :

- a. Perekonomian dalam keadaan *full employment* dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian yang terdiri dari dua sektor yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan nasional dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output dan rasio penambahan modal-output.

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional, s , serta rasio modal-output nasional, k . secara lebih rinci, persamaan itu menyatakan bahwa tanpa adanya campur tangan pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung atau secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan (yakni, semakin banyak bagian GDP yang dihasilkan) dan secara negatif atau berbanding terbalik terhadap rasio modal-output dari suatu perekonomian (yakni, semakin besar rasio modal-output nasional atau k , maka semakin rendah pula tingkat pertumbuhan GDP).

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

A. Definisi PDRB

Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, dimana nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016).

Perhitungan PDRB menggunakan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Sukirno, 2005). Sedangkan menurut BPS (2016) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Menurut Tarigan (2004), cara untuk menghitung angka-angka PDRB terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam menghitung PDRB yaitu:

a. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB ialah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto.

Tiga pendekatan tersebut merupakan metode langsung dalam menghitung angka-angka PDRB, adapun metode tidak langsung dalam menghitung angka-angka PDRB yaitu metode alokasi yakni dengan cara mengalokasikan PDB menjadi PDRB provinsi ataupun sebaliknya yakni PDRB provinsi menjadi PDRB kabupaten atau kota dengan menggunakan berbagai indikator produksi maupun indikator lainnya yang sesuai sebagai alokator (Sukirno, 2000).

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan adanya kebijakan dari pemerintah. Dimana apabila pemerintah telah menetapkan dan menentukan suatu kebijakan untuk membeli barang maupun jasa, maka disitulah pengeluaran pemerintah mencerminkan adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Terdapat dua teori yang dikelompokkan untuk membahas pengeluaran pemerintah yaitu teori makro dan teori mikro.

1. Teori Makro Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut :

(Boediono,1999)

a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.

- b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.
- c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment\

a. Teori Rostow dan Musgrave

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (Dumairy, 1997) Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik (Basri, 2005). Dalam satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta terhadap GNP semakin besar. Tetapi rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Sementara itu, Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. (Dumairy, 1997) Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak disadari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. (Mangkoesobroto, 1994)

2. Teori Mikro

Didalam teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yaitu untuk menganalisis adanya faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan yang mempengaruhi tersedianya barang publik tersebut. Adanya permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro menimbulkan interaksi akan barang publik dalam penentuan jumlah barang publik yang disediakan melalui anggaran belanja, dimana hal tersebut berpengaruh pada timbulnya akan permintaan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penentuan Permintaan

$$U_i = f(G, X)$$

Dimana:

G = vektor dari barang publik

X = vektor barang swasta

i = individu; = 1, ..., m

U = fungsi utilitas

2.1.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu komponen dalam permintaan agregat (*aggregate demand* / AD) adalah pengeluaran pemerintah. Dimana secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka *aggregate demand* (AD) juga akan mengalami peningkatan atau meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah di negara sedang berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas sehingga peranan pemerintah menjadi sangat penting. Dikarenakan terdapat peranan pemerintah yang tidak bisa dilakukan oleh peran swasta seperti penyediaan pelayanan publik. Peningkatan *aggregate demand* (AD) menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) maka peningkatan PDB berarti peningkatan pendapatan. Menurut Nordhaus (1995) terdapat empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Sumberdaya manusia
- 2) Teknologi
- 3) Sumberdaya alam
- 4) Pembentukan modal

2.1.5 Pengelompokan Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pengeluaran rutin, merupakan anggaran yang disediakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Pengeluaran rutin ini meliputi: belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi yang didalamnya termasuk (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan bunga utang pemerintah, dan jumlah pengeluaran lainnya. Pengeluaran penting disini memiliki fungsi penting dimana dalam menunjang kelancaran mekanisme system pemerintahan serta dalam upaya efisiensi dan produktivitas yang akan mencapai sasaran dan tugas dalam setiap pembangunan.
- b. Pengeluaran pembangunan, merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk pembiayaan dalam proses perubahan, dimana kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Pengeluaran pembangunan ini bersifat menambah modal masyarakat baik itu dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik. Pengeluaran pembangunan juga ditujukan untuk membiayai program-program yang digunakan dalam pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang

berhasil dimobilisasi. Dana tersebut kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Menurut Dumairy (1999) Pemerintah memiliki 4 peran yaitu :

- a. Peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
- b. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil dan wajar.
- c. Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan equilibrium.
- d. Peran Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

2.1.6 Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap (PDRB)

Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian merupakan hal yang sangat penting, hal ini disebabkan sektor pertanian dapat menyerap sebagian besar angkatan kerja pedesaan di negara – negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Kebijakan pembangunan sektor pertanian sangat penting untuk memberantas kemiskinan, karena realita menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan dan mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian (Todaro dan Smith, 2003).

Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Sektor pertanian merupakan sektor primer, tidak dapat dipungkiri pertanian merupakan pekerjaan yang masih dilakukan oleh masyarakat, sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada pertanian sehingga tidak dipungkiri bahwa sektor pertanian memiliki peranan penting dalam kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga disini keberadaan sektor pertanian perlu mendapat dukungan khusus dari setiap daerah hal ini

terlihat dari banyaknya masalah dalam sektor pertanian mulai dari lahan pertanian yang semakin lama semakin tergeser dan banyaknya tenaga kerja yang masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Untuk mendukung sektor pertanian diperlukan program kegiatan pertanian yang dapat menunjang dan meningkatkan pendapatan petani. Dalam pelaksanaan program-program tersebut tentunya peran pemerintah disini diperlukan dalam pengambilan kebijakan yang tepat dalam sektor pertanian, dalam melaksanakan program kebijakan pemerintah sebagai pengeluaran pemerintah tentunya memerlukan dana dalam pelaksanaan operasional, besaran proporsi dana yang dikeluarkan di sektor pertanian menggambarkan seberapa besar dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian tersebut.

2.1.7 Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap (PDRB)

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penambahan kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang dan jasa. Peningkatan produksi ini akan meningkatkan kebutuhan input tenaga kerja, sehingga akan memperluas penyerapan kesempatan kerja. Menurut Ruliansyah (2012), jumlah PDRB yang meningkat menggambarkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menggambarkan pertumbuhan jumlah proyek dan jumlah kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh pasar yang memberikan respon positif terhadap pertumbuhan ekonomi. PDRB adalah sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah atau regional tanpa memilik atas faktor produksi. Jadi, PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi dimana dari total naik turunnya PDRB dapat diketahui pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan pendapatan perkapita suatu daerah. Naiknya pendapatan perkapita dalam hal ini bisa berarti naiknya jumlah serapan tenaga kerja.

2.1.8 Teori David Ricardo

A. Teori David Ricardo

Pandangan David Ricardo mengenai proses pertumbuhan ekonomi yaitu memperkaya teori Adam Smith dimana tidak jauh berbeda dengan pendapat Adam Smith yang berfokus pada laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Dimana tema pertumbuhan David Ricardo masih berfokus pada pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output yang mengungkapkan adanya keterbatasan faktor produksi tanah atau keterbatasan lahan yang bersifat tetap sehingga menghambat proses pertumbuhan ekonomi. Teori Ricardo ini diungkapkan pertama kali dalam bukunya yang berjudul “*The Principles of Political Economy of Taxation*” yang diterbitkan pada tahun 1917 (Arsyad, 1999). Dimana didalam judul yang berjudul *The Principles of Political of Taxation* (Prinsip-prinsip Perekonomian Politik dan Perpajakan) David Ricardo mengemukakan beberapa teori yaitu:

1. Teori Sewa Tanah (Land Rent)

David Ricardo yang menentukan tingginya tingkat sewa tanah bukanlah tanah yang paling subur melainkan tanah marginal (*marginal land*) dalam menganalisis faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya sewa tanah Ricardo menggunakan pendekatan analisis marginal.

2. Teori Nilai Kerja (Labor Theory of Value) dan Teori Upah Alami (Natural Wages)

Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Ongkos itu berupa biaya untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk bertahan hidup (*subsisten*). Upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk sekedar bertahan hidup dinamakan upah alami (*natural wage*). Menurut Ricardo jika harga yang ditetapkan lebih besar dari biaya-biaya, dalam jangka pendek maka perusahaan akan menikmati laba ekonomi dan laba ini akan menarik perusahaan lainnya untuk masuk kedalam pasar sehingga produksi akan meningkat dan berakibat kelebihan produksi (*over supply*) di pasar. Kelebihan penawaran barang akan mendorong harga-harga turun kembali pada keseimbangan semula. Ricardo

menyimpulkan bahwa yang paling menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami yang besarnya hanya cukup untuk bertahan hidup saja. Besarnya upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat dan upah alami akan mengalami kenaikan sesuai dengan standar kehidupan masyarakat.

3. Teori Keuntungan Komparatif (Comparative Advantage)

Ricardo menyebutkan setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya menghasilkan produk yang lebih efisien. Selanjutnya kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan. Hasilnya dapat dipergunakan untuk membeli barang-barang lain yang tidak dibutuhkan lebih banyak.

Proses pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo dalam Sukirno (2006) adalah sebagai berikut.

1. Pada permulaannya jumlah penduduk rendah dan kekayaan alam masih melimpah sehingga para pengusaha memperoleh keuntungan yang tinggi. Karena pembentukan modal tergantung pada keuntungannya, maka laba yang tinggi tersebut akan diikuti dengan pembentukan modal yang tinggi pula. Pada tahap ini maka akan terjadi kenaikan produksi dan peningkatan permintaan tenaga kerja.
2. Pada tahapan kedua, karena jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan bertambah, maka upah akan naik dan kenaikan upah tersebut akan mendorong pertumbuhan penduduk. Karena luas tanah tetap, maka makin lama tanah yang digunakan mutunya akan semakin rendah. Sebagai akibatnya, setiap tambahan hasil yang diciptakan oleh masing-masing pekerja akan semakin berkurang. Dengan semakin terbatasnya jumlah tanah yang dibutuhkan (sumber daya yang tersedia), maka harga sewa lahan akan semakin tinggi. Hal ini akan mengurangi keuntungan pengusaha yang menyebabkan pengusaha tersebut untuk mengurangi pembentukan modal dan menurunkan permintaan tenaga kerja yang berakibat pada turunnya tingkat upah.
3. Tahap ketiga ditandai dengan menurunnya tingkat upah dan pada akhirnya akan berada pada tingkat minimal. Pada tingkat ini, perekonomian akan mencapai stationary state. Pembentukan modal baru tidak akan terjadi lagi karena sewa

tanah yang sangat tinggi menyebabkan pengusaha tidak memperoleh keuntungan.

2.1.9 Lahan

Lahan (*land*) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan dibawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia dimasa lalu dan sekarang yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang (Brinkman dan Smyth, 1973; Vink, 1975; dan FAO, 1976, dalam Juhadi 2007). Menurut (Juhadi, 2007). Lahan dalam arti ruang menurut (Sadyohutomo, 2008) memiliki keunikan sebagai berikut:

- a. Dari aspek lokasi, letaknya tetap, tidak dapat dipindah.
- b. Luas lahan pada suatu wilayah hampir tidak berubah. Perubahan dapat terjadi apabila ada reklamasi perairan menjadi dataran.
- c. Peranan lahan bagi kehidupan manusia berdimensi kompleks, yaitu ekonomi, sosial, budaya, politik serta pertahanan dan keamanan.

Lahan mempunyai arti penting bagi para *stakeholder* yang memanfaatkannya. Fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Menurut Sumaryanto dan Tahlim (2005) menyebutkan bahwa manfaat lahan Pertanian dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, *use values* atau nilai penggunaan dapat pula disebut sebagai *personal use values*. Manfaat ini dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan usahatani yang dilakukan pada sumber daya lahan pertanian. Kedua, *non use values* dapat pula disebut sebagai *intrinsic values* atau manfaat bawaan. Berbagai manfaat yang tercipta dengan sendirinya walaupun bukan merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi dari pemilik lahan pertanian termasuk dalam kategori ini. Secara mikro, pengaruh tanah dalam pertanian dilihat dari penguasaan lahan, luas lahan

garapan, dan nilai lahan. Macam-macam lahan menurut kepemilikan oleh petani dibedakan menjadi (Hanafie R, 2010) :

1. Lahan yang dibeli, baik kontan maupun angsuran.
2. Lahan warisan, yaitu lahan yang diterima oleh ahli waris berdasarkan pembagian dari harta orangtua yang telah meninggal dunia.
3. Lahan yang diperoleh secara hibah, yaitu lahan yang diterima/didapat secara Cuma-Cuma dari badan/harta orang yang masih hidup.
4. Lahan yang dimiliki berdasarkan *land reform*, permohonan biasa, bagian lahan transmigrasi, pembagian lahan dari pembukaan hutan, hukum adat, atau menyerahkan dari program perkebunan inti rakyat.
5. Lahan sewa, yaitu lahan yang didapat dengan perjanjian sewa, yang besarnya sewa sudah ditentukan terlebih dahulu tanpa melihat besar kecilnya hasil produksi.
6. Lahan bagi hasil (sakap), yaitu lahan sewa, tetapi dengan perjanjian besarnya sewa berdasarkan hasil panen / produksi dan dibayarkan setelah panen.
7. Lahan gadai, yaitu lahan yang berasal dari pihak lain sebagai jaminan pinjaman uang pihak yang menggadaikan lahannya.
8. Lahan bengkok / pelungguh, yaitu lahan milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong desa atau bekas pamong desa sebagai gaji atau pensiun.
9. Lahan bebas sewa, serobotan, dan lahan garapan. Lahan bebas sewa adalah lahan yang didapatkan dengan tanpa membeli atau membayar sewa dan bukan merupakan lahan milik, tetapi hanya diizinkan memakai dengan bebas sewa.
10. Lahan yang dikuasai adalah lahan milik sendiri ditambah lahan yang berasal dari pihak lain dan dikurangi lahan yang berada dipihak lain. Lahan tersebut berupa lahan sawah dan lahan bukan sawah.
11. Lahan pertanian adalah lahan yang dikuasai dan pernah diusahakan untuk pertanian selama setahun yang lalu. Lahan tersebut mencakup lahan sawah, huma, ladang, tegal/kebun, lahan perkebunan, hutan, dan lahan untuk pengembalaan/padang rumput.
12. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/ menyalurkan air yang biasanya

ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut.

13. Lahan bukan sawah adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman musiman atau tanaman tahunan, lahan untuk kolam atau untuk kegiatan usaha pertanian lainnya. Lahan bukan sawah meliputi huma, ladang, tegal, kebun, kolam/tebat/empang, dan lahan perkebunan.
14. Huma adalah lahan kering yang biasanya ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi. Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali bila kesuburannya kembali.
15. Ladang/tegal/kebun adalah lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tanaman tahunan, serta terpisah dengan halaman sekitar rumah dan penggunaannya tidak berpindah-pindah. Lahan yang dibiarkan kosong kurang dari satu tahun (menunggu masa penanaman yang akan datang) dianggap sebagai kebun/tegal apabila hendak ditanami tanaman musiman/tahunan atau dianggap sebagai lahan perkebunan apabila akan ditanami tanaman perkebunan.
16. Lahan tidur adalah lahan yang biasanya digunakan untuk usaha pertanian, tetapi tidak dimanfaatkan lebih dari 2 tahun.

Setiap jenis penggunaan lahan (pertanian maupun non pertanian) memiliki nilai *land rent* yang berbeda. Jenis penggunaan lahan dengan keuntungan komparatif tertinggi akan mempunyai kapasitas penggunaan lahan terbesar, sehingga penggunaan lahan tertentu akan dialokasikan untuk kegiatan yang memberikan nilai *land rent* tertinggi. Demikian juga dengan penggunaan lahan pertanian meskipun lebih lestari kemampuannya dalam menjamin kehidupan petani, tetapi hanya dapat memberikan sedikit keuntungan materi atau finansial dibandingkan sektor industri, pemukiman dan jasa lainnya.

a. Fungsi Lahan.

Menurut Manuwoto (1991) fungsi lahan secara umum dibagi menjadi:

1. Lahan yang mempunyai fungsi lindung ternyata sebagai atau seluruhnya telah lama di huni oleh penduduk, Berbagai kegiatan sosial ekonomi telah

dilaksanakan secara turun-temurun dan telah tertanam secara kuat nilai-nilai sosial budaya yang berkaitan dengan yang ditempatinya.

2. Lahan yang mempunyai fungsi lindung yang telah ditetapkan sebagai atau seluruhnya telah terlanjur diserahkan kepada pengusaha, seperti HPH dalam jangka waktu tertentu.
3. Lahan budidaya potensial yang telah ditetapkan untuk pengembangan produksi pertanian, ternyata banyak yang belum dapat dijangkau atau terisolir, tidak berpenduduk atau penduduknya sangat jarang.
4. Adanya benturan kepentingan antara berbagai faktor tertentu seperti misalnya lahan budidaya yang telah diperuntukan bagi suatu sektor tertentu yang potensial (pengairan atau pertambangan) ternyata telah dihuni oleh penduduk dengan kegiatan pertanian yang telah dilakukan secara turun temurun.

2.1.10 Pengaruh Luas Lahan Terhadap PDRB

Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan PDRB, perolehan devisa, penyediaan pangan, dan bahan industri, pengetasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Suhendara (2004) mengatakan bahwa sektor pertanian yang berhasil merupakan persyaratan bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Faktor-faktor produksi pertanian terdiri dari: Tanah, Tenaga kerja, dan Modal. Lahan merupakan media tanam yang digunakan untuk produktivitas dalam sektor pertanian guna menunjang hasil produksi usaha pertanian pada suatu daerah sehingga dapat meningkatkan PDRB pada daerah tersebut. Luas lahan yang digunakan dalam sektor pertanian terdiri atas luas lahan sawah, luas lahan tegal atau kebun, luas lahan ladang atau huma, dan lahan sementara. Luas lahan yang digunakan dalam kegiatan pertanian yaitu lahan yang masih produktif, Sehingga dengan adanya luas lahan yang masih produktif maka aktivitas pada sektor pertanian dapat dikembangkan dan menunjang produktivitas pada sektor pertanian yang akan menaikkan PDRB pada daerah tersebut melalui sektor pertanian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pernyataan penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya berperan sangat penting dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini dapat terlihat berdasarkan matriks penelitian terdahulu sebagai berikut.

Penelitian Suwanti, Edy Yusuf Agung Gunantov melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010*”. Dalam penelitiannya digunakan variabel pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, tenaga kerja di sektor pertanian, dan PDRB di sektor pertanian. Alat analisis yang digunakan adalah regresi dengan menggunakan data panel. Dalam penelitian ditemukan bahwa hasil analisis menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan PDRB sektor pertanian yaitu positif tetapi tidak signifikan, Artinya jika pengeluaran pemerintah meningkat maka PDRB sektor pertanian juga meningkat tetapi tidak memberikan dampak secara langsung, Hasil analisis menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara tenaga kerja terhadap PDRB sektor pertanian, hal ini berarti jika tenaga kerja meningkat maka PDRB sektor pertanian meningkat.

Penelitian Yana Puspita Kristiana judul “*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Kebijakan RENSTRA Terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah*”. Dalam penelitiannya menggunakan variabel pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, kebijakan RENSTRA dan variabel PDRB sektor pertanian. Alat analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dengan metode panel data. Dalam penelitian ini yaitu dimana pengeluaran pemerintah sektor pertanian memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian dengan nilai koefisien yaitu 0,077735. Pengaruh tenaga kerja memberikan pengaruh negatif terhadap PDRB sektor pertanian dilihat dari nilai koefisiennya -0,044504. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian. Setiap ada kenaikan 1 % tenaga kerja akan mengurangi PDRB sektor pertanian sebesar -0,044504.

Penelitian oleh M. Taufiq melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Wilayah EKS Karesidenan Besuki.”*. Dalam penelitiannya difokuskan dua sektor utama yang menjadi variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan tenaga kerja sektor pertanian dengan variabel dependen PDRB sektor pertanian. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda sederhana dengan menggunakan data panel. Hasil penelitian adalah variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB sektor pertanian dengan hasil dari uji parsial variabel sebesar 0.438892920819 serta nilai probabilitas sebesar 0.0140 atau lebih kecil dari nilai P-value 0.05. Sedangkan Variabel tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB sektor pertanian koefisien sebesar 1.34459059294 serta nilai probabilitas sebesar 0.0218 yang lebih kecil dari P-value 0.05.

Penelitian oleh Ahamd Jazuli Rahman melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten/ Kota Di Provinsi Banten Tahun 2010-2014”*. Dalam penelitiannya terdapat variabel investasi yang terdiri dari variabel independen PMA dan PMDN, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja sektor pertanian. Sedangkan variabel dependennya yaitu PDRB. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan sederhana dan menggunakan metode panel data. Hasil penelitian, ditemukan bahwa investasi dilihat dari total jumlah investasi baik PMA maupun PMDN berpengaruh positif dan signifikan, nilai t hitung sebesar 2,189547 dan nilai probabilitas sebesar 0.0368. Pengeluaran pemerintah dalam APBD baik pengeluaran langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, nilai t hitung sebesar 17,71518 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Tenaga Kerja Berpengaruh Negatif terhadap pertumbuhan PDRB. Tenaga Kerja memiliki nilai t hitung sebesar -0,524607 dan nilai probabilitas sebesar 0,6038.

Penelitian Harry A. P. Sitanipessy melakukan penelitian dengan judul *“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD (Studi kasus Kabupaten Maluku Tengah Periode 2005-2011)”*. Dalam penelitiannya difokuskan

tiga sektor utama yang menjadi variabel independen diantaranya sektor pertanian, sektor perikanan dan keautan, dan sektor perdagangan dan industri, dengan variabel dependen PDRB dan PAD. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan sederhana untuk empat hipotesis yang diujikan. Hasil penelitian, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, sektor perikanan dan kelautan, sector perdagangan dan industri baik secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB, dan PDRB juga berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian dilakukan oleh Evi Savira dengan judul *“Pengaruh PMDN, PMDA, Tenaga Kerja dan Luas Lahan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Aceh”*. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda sederhana dengan menggunakan data panel dengan menggunakan variabel independen PMDN, PMA, tenaga kerja dan luas lahan, sedangkan variabel dependennya adalah PDRB sektor pertanian. Hasil penelitian ditemukan bahwa koefisien regresi PMDN sebesar 0,038983 menunjukkan adanya pengaruh yang positif terhadap PDRB. Koefisien regresi Luas Lahan sebesar -0,059861 menunjukkan adanya pengaruh yang negatif terhadap PDRB sektor pertanian. PMA dan Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Aceh.

Penelitian dilakukan oleh Ika Kusumayani dengan judul *“Perubahan Penggunaan Lahan Dan Sosial Budaya Dari Pertanian ke Non Pertanian Di Kota Gede Yogyakarta”*. Survei Lapangan, dianalisis secara Deskriptif Evaluatif dengan hasil penelitian tahun 2001-200 didominasi oleh lahan pemukiman. Terdapat empat faktor- faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yaitu pertumbuhan penduduk, kegiatan pertanian dipandang tidak menguntungkan secara ekonomi, meningkatnya harga tanah dan terbuktinya kesempatan kerja non pertanian. - Status sosial ekonomi penduduk meningkat.

Penelitian dilakukan oleh Siti Sabrina Salqaura, Jangkung Handoyo Mulyo, Dwidjono Hadi Darwanto dengan judul *“The Influence of Fiscal Policy on Agriculture Sector in Java Island.”* dengan menggunakan data panel metode *fixed effect model*. Dengan variabel dependen GDRP dan variabel independen

Total Expenditure, Agricultural Labor, Foreign Investment, dan Domestic Investment. Hasil penelitian ditemukan yaitu Total Expenditure 0.1447 signifikan terhadap GDRP dengan nilai probabilitas 0.0000. Agricultural Labor -0.0275 negatif dan tidak signifikan terhadap GDRP dengan nilai probabilitas 0.7370. Foreign Investment 0.0058 positif tetapi tidak signifikan terhadap GDRP nilai probabilitas 0.3283. Domestic Investment -0.0039 negatif dan tidak signifikan terhadap GDRP dengan nilai probabilitas 0.5675.

Penelitian dilakukan oleh Ratni Heliati, Yovino Dwiputra. Dengan judul penelitian "*Agricultural Sector Investment on Gross Domestic Regional Product (GDRP) in West Java 2007-2012*". Dengan variabel dependen GDRP sedangkan variabel independen adalah foreign capital investment, domestic capital investment, labor, BI rate, dan exchange rate. Menggunakan analisis panel data dengan menggunakan *general least square*. Hasil penelitian ditemukan bahwa Variabel Foreign Capital Investment, berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDRP 0,1229657 dengan probabilitas 0,000. Variabel Domestic Capital Investment positif tetapi tidak signifikan terhadap GDRP 0,0434732, nilai probabilitas 0,210. Labor berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDRP 0,152439 dengan probabilitas 0,502. Exchange rate positif dan signifikan terhadap GDRP dengan koefisien 5,43849 dan probabilitas 0,000. BI Rate berpengaruh negatif signifikan terhadap GDRP -1,425778 dengan probabilitas 0,000 .

Penelitian dilakukan oleh Sarwono dengan judul penelitian "*Analysis of Economic Growth Factors in West Pantura Areas of Central Java*". Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah GDRP sebagai variabel dependen sedangkan variabel independennya adalah government expenditure, quality of human resources, agglomeration, labor, dan investment. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Variabel Government Expenditure positif signifikan terhadap GDRP dengan nilai koefisien 0.005022, variabel Labor positif signifikan terhadap GDRP nilai koefisien 0.153604, Investment positif signifikan terhadap GDRP dengan koefisien 0.010887, sedangkan variabel Agglomeration dan Quality of Human Resources tidak signifikan terhadap variabel GDRP.

Penelitian Terdahulu

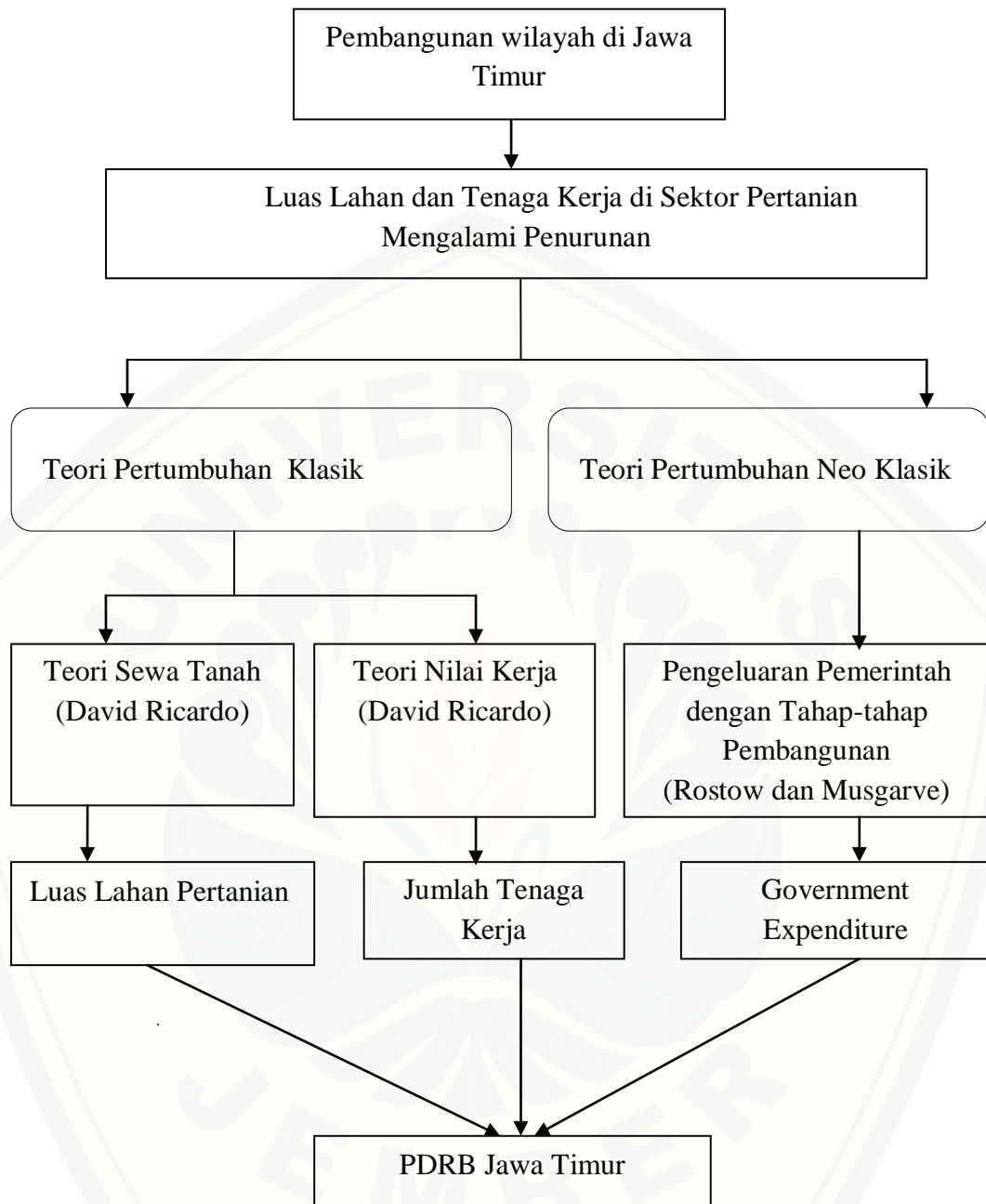
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Kesimpulan
1	Suwanti, Edy Yusuf Agung Gunantov (2013)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010.	Analisis regresi sederhana dengan metode panel data.	Variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian yaitu positif tetapi tidak signifikan, sedangkan variabel tenaga kerja terhadap PDRB sektor pertanian positif dan signifikan.
2	Yana Puspita Kristiana (2014)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Kebijakan RENSTRA terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah.	Analisis regresi sederhana dengan metode panel data.	Variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian dengan nilai koefisien yaitu 0,077735. Variabel tenaga kerja memberikan pengaruh negative terhadap PDRB sektor pertanian dengan koefisien - 0,044504.
3	M. Taufiq (2016)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Wilayah EKS Karesidenan Besuki.	Analisis regresi sederhana dengan metode panel data.	Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB sektor pertanian dengan hasil dari uji parsial variabel sebesar 0.438892920819 serta nilai probabilitas sebesar 0.0140 atau lebih kecil dari nilai P-value 0.05. Variabel tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB sektor pertanian koefisien sebesar 1.34459059294 serta nilai probabilitas sebesar 0.0218 yang lebih kecil dari P-value 0.05.
4	Ahamd Jazuli Rahman (2016)	Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten/ Kota di Provinsi	Analisis regresi sederhana dengan metode panel data.	Investasi dilihat dari total jumlah investasi baik PMA maupun PMDN berpengaruh positif dan signifikan, nilai t hitung sebesar 2,189547 dan nilai probabilitas sebesar 0.0368. Pengeluaran pemerintah dalam APBD baik pengeluaran langsung

		Banten Tahun 2010-2014.		maupun tidak langsung dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, nilai t hitung sebesar 17,71518 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Tenaga Kerja Berpengaruh Negatif terhadap pertumbuhan PDRB. Tenaga Kerja memiliki nilai t hitung sebesar -0,524607 dan nilai probabilitas sebesar 0,6038.
5	Harry A.P. Sitanipessy (2012)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD Maluku Tengah 2005-2011.	Analisis regresi sederhana dengan metode panel data.	Pengeluaran Pemerintah di sektor pertanian, perikanan dan kelautan, sektor perdagangan dan industri baik secara simultan dan parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB.
6	Evi Savira (2018)	Pengaruh PMDN, PMDA, Tenaga Kerja dan Luas Lahan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Aceh.	Alat Analisis Sederhana dengan Metode Panel Data.	Koefisien regresi PMDN sebesar 0,038983 menunjukkan adanya pengaruh yang positif terhadap PDRB. Koefisien regresi Luas Lahan sebesar 0,069861 menunjukkan adanya pengaruh tidak signifikan terhadap PDRB sektor pertanian. PMA dan Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Aceh
7	Ika Kusumayani (2005). Tesis.	Perubahan Penggunaan Lahan Dan Sosial Budaya Dari Pertanian ke Non Pertanian Di Kota Gede Yogyakarta.	Survai Lapangan, dianalisis secara Deskriptif Evaluatif.	Tahun 2001-2004 didominasi lahan pemukiman. Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan: pertumbuhan penduduk, kegiatan pertanian dipandang tidak menguntungkan secara ekonomi, meningkatnya harga tanah dan terbuktinya kesempatan kerja non pertanian. Status sosial ekonomi penduduk meningkat.
8	Siti Sabrina Salqaura, Jangkung Handoyo Mulyo, Dwidjono Hadi Darwanto	The Influence of Fiscal Policy on Agriculture Sector in Java Island.	Data Panel dengan menggunakan model <i>fixed effect</i> .	Total Expenditure 0.1447 signifikan terhadap GDRP dengan nilai probabilitas 0.0000. Agricultural Labor -0.0275 negatif dan tidak signifikan terhadap GDRP dengan nilai probabilitas 0.7370. Foreign Investment 0.0058 positif tetapi tidak signifakn terhadap GDRP

	(2018)			nilai probabilitas 0.3283. Domestic Investment -0.0039 negatif dan tidak signifikan terhadap GDRP dengan nilai probabilitas 0.5675.
9	Ratni Heliati Yovino Dwiputra (2016)	Agricultural Sector Investment on Gross Domestic Regional Product (GDRP) in West Java 2007-2012.	Panel data dengan menggunakan <i>general least square</i> .	Variabel Foreign Capital Investment, berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDRP 0,1229657 dengan probabilitas 0,000. Variabel Domestic Capital Investment positif tetapi tidak signifikan terhadap GDRP 0,0434732, nilai probabilitas 0,210 Labor berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDRP 0,152439 dengan probabilitas 0,502 Exchange rate positif dan signifikan terhadap GDRP dengan koefisien 5,43849 dan probabilitas 0,000. BI Rate berpengaruh negative signifikan terhadap GDRP -1,425778 dengan probabilitas 0,000
10	Sarwono (2016)	Analysis of Economic Growth Factors in West Pantura Areas of Central Java.	Panel data dengan menggunakan <i>fixed effect model</i> .	Variabel Government Expenditure positif signifikan terhadap GDRP dengan nilai koefisien 0.005022. Variabel Labor positif signifikan terhadap GDRP nilai koefisien 0.153604. Investment positif signifikan terhadap GDRP dengan koefisien 0.010887. Sedangkan variabel Agglomeration dan Quality of Human Resources tidak signifikan.

2.3 Kerangka Konseptual

Pengeluaran pemerintah atau *government expenditure* merupakan suatu kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah berupa suatu tindakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah digunakan dalam pembelian barang maupun jasa pada suatu sektor. Sektor-sektor yang memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah tentunya merupakan sektor unggulan yang menjadi penopang perekonomian suatu daerah, salah satunya yakni pada sektor pertanian, pengeluaran pemerintah di sektor pertanian merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, dalam pembelian barang maupun jasa pada sektor pertanian. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian ditunjukkan dengan jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan untuk sektor pertanian dimana pengeluaran pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan. Salah satu penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Provinsi Jawa Timur yaitu pada sektor pertanian, dimana di wilayah Jawa Timur sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak diminati masyarakat dalam memilih pekerjaan tetapi tidak diimbangi dengan luas lahan pertanian yang semakin lama sudah tidak produktif atau kurang subur dan memaksa tenaga kerja di sektor pertanian untuk beralih pada sektor non pertanian. Melalui kebijakan pemerintah yaitu pengeluaran pemerintah sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur, diharapkan mampu mengembangkan dan memperbaiki sektor pertanian yang sudah ada seperti program pemberdayaan di sektor pertanian, yaitu melalui program pembangunan infrastruktur pertanian, dan program teknologi pertanian yang masih kurang memadai di daerah Jawa Timur. Untuk tenaga kerja diharapkan memperhatikan kualitas tenaga kerja seperti, kemandirian dan penguasaan terhadap teknologi pertanian. Sehingga tenaga kerja sektor pertanian tidak hanya bertambah pada sisi jumlah saja melainkan juga secara kualitas.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah yang akan diuji kebenarannya. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur di sektor pertanian berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015.
2. Tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015.
3. Luas Lahan Pertanian berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan penelitian eksplanatori (Explanatory research), dimana dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel penelitian dengan pengujian hipotesa dan bertujuan memberikan gambaran untuk memahami karakteristik objek dari suatu penelitian dalam beberapa aspek secara sistematis (Singarimbun dan Effendi, 1995).

3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian bertempat di Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota, terdiri dari kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Situbondo, Trenggalek, Tuban, Tulungagung. Dan 9 kota yakni kota Batu, Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya. Dengan kurun waktu penelitian dimulai tahun 2010 sampai tahun 2015. Pemilihan wilayah ini dikarenakan ingin melihat kembali bagaimana perkembangan Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan sektor unggulan melalui sektor pertanian, sehingga dengan dipilihnya wilayah ini diharapkan mampu bermanfaat untuk kedepannya dalam mengatasi permasalahan.

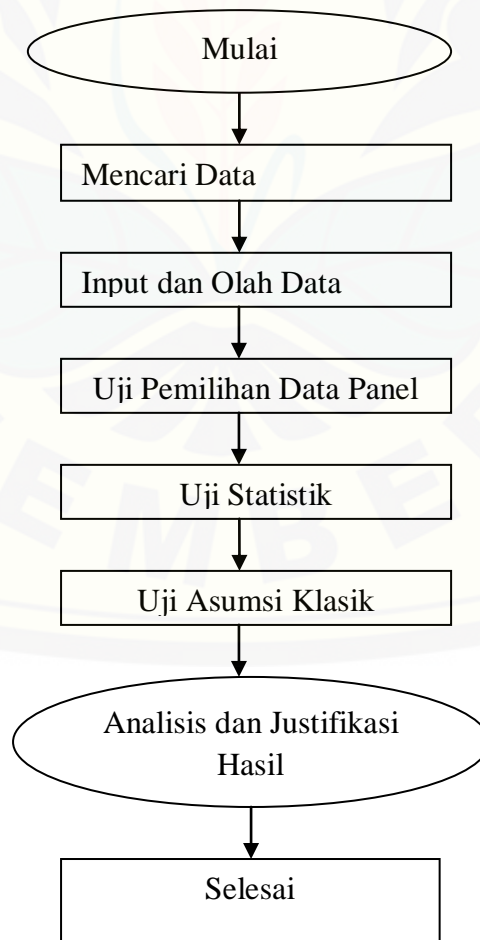
3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain, seperti: buku-buku, literature, catatan-catatan atau sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian

mempergunakan data yang telah tersedia dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif . Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

1. Data Prooduk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2015 bersumber dari BPS Provinsi Jawa Timur.
2. Data anggaran pendapatan belanja daerah APBD Pengeluaran Pemerintah sektor pertanian bersumber dari APBD di Provinsi Jawa Timur.
3. Data jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian bersumber dari BPS Provinsi Jawa Timur.
4. Data luas lahan pertanian bersumber dari BPS Provinsi Jawa Timur.

3.2 Desain Penelitian



3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendukung hasil penelitian dari permasalahan yang dihadapi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan alat analisis dan metode dalam menjawab pertanyaan yang timbul dari rumusan masalah.

3.3.1 Analisis Regresi Data Panel

Analisis Regresi merupakan Model analisis yang dipilih karena untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya yang ada di dalam analisis tersebut ditentukan suatu persamaan yang menaksir sifat hubungan fungsional diantara variabel-variabel yang akan diteliti. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun dan Efendi dalam Sahara, 2004). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu nilai data yang dinyatakan dalam skala numerik untuk mengetahui perubahan nilai variabel dependen yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang disebabkan karena adanya perubahan pada variabel-variabel independen dalam penelitian ini, maka metode analisis regresi yang digunakan adalah metode ini adalah menggunakan data panel. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini juga digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai keterkaitan variabel pengeluaran pemerintah sektor pertanian, tenaga kerja, dan luas lahan pertanian terhadap pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Analisis data panel adalah suatu metode mengenai gabungan dari data antar waktu (*time series*) dengan antar individu (*cross section*). Untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data cross section, nilai dari suatu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu waktu. Dalam data panel, unit cross section yang sama di survey dalam beberapa waktu (Gujarati, 2003). Adapun model ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data panel dan regresi OLS. pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pengeluaran pemerintah, tenaga kerja sektor peertanian dan luas lahan pertanian

terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Adapun model ekonomi yang digunakan adalah:

Persamaan model :

$$LPDRB_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 LGOV_{it} + \alpha_2 LTK_{it} + \alpha_3 LAGR_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

LPDRB = Log variabel PDRB Provinsi Jawa Timur

LGOV = Log pengeluaran pemerintah sektor pertanian

LTK = Log tenaga kerja yang bekerja disektor pertanian

LAGR = Log luas lahan sektor pertanian

α_0 = Konstanta Persamaan 1

α_1 - α_2 = Koefisien Regresi

μ_{it} = komponen error di waktu t untuk unit *cross-section* i

3.3.2 Uji Pemilihan Data Panel

Dalam pemilihan model yang paling tepat untuk digunakan dalam mengelola data panel, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan yaitu: Uji Chow, Uji Housman dan Uji Lagrange Multiplier.

a. Uji Chow

Chow test adalah pengujian untuk menentukan model *common effect* atau *fixed effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam *chow test* adalah:

H_0 : model mengikuti *Common Effect* atau *pooled OLS*

H_a : model mengikuti *Fixed Effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan $F_{statistik}$ dengan F_{tabel} . Perbandingan dipakai apabila hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, berarti model yang paling tepat digunakan adalah Model *Fixed Effect*. Begitu sebaliknya, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan model yang digunakan adalah *Common Effect Model* (Widarjono, 2005). Perhitungan F statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus (Baltagi, 2005):

$$F = \frac{SSE_1 - SSE_2}{(n-1)} \div \frac{SSE_2}{(nt-n-k)}$$

Keterangan :

SSE1 = Sum Square Error dari model *Common Effect*

SSE2 = Sum Square Error dari model *Fixed Effect*

n = Jumlah perusahaan (*cross section*)

nt = Jumlah cross section x jumlah time series

k = Jumlah variabel independen

Sedangkan F tabel didapat dari:

$$F_{tabel} = \{ \alpha: df(n-1, nt-n-k) \}$$

Keterangan :

α = Tingkat signifikansi yang dipakai

n = Jumlah perusahaan (*cross section*)

nt = Jumlah cross section x jumlah time series

k = Jumlah variabel independen

Apabila dari hasil *Chow test* ditentukan bahwa metode *Common Effect* yang digunakan, maka tidak perlu diuji dengan *Hausman test*, tetapi apabila dari hasil *Chow test* tersebut ditentukan bahwa metode *Fixed Effect* yang digunakan, maka harus ada uji lanjutan dengan Uji Hausman untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect* yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel

b. Uji Hausman

Setelah selesai melakukan *Chow test* dan didapatkan model yang tepat adalah *Fixed Effect*, maka selanjutnya akan diuji model manakah antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat, pengujian ini disebut sebagai *Hausman test*. Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H_0 : model mengikuti *Random Effect*

H_a : model mengikuti *Fixed Effect*

Uji Hausman akan mengikuti distribusi *chi-squares* Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah model *Fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Random Effect*.

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (*LM-test*) adalah uji untuk mengetahui apakah model *Random Effect* atau model *Common Effect* (OLS) yang paling tepat digunakan. Uji signifikansi *Random Effect* ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikansi *Random Effect* didasarkan pada nilai *residual* dari metode OLS.

Hipotesis yang digunakan adalah:

H_0 : model mengikuti *Common Effect Model*

H_a : model mengikuti *Random Effect Model*.

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis *statistic chi-squares* maka kita menolak H_0 , yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Random Effect* dari pada metode *Common Effect*. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis, maka kita menerima H_0 , yang artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel adalah metode *Common Effect* bukan metode *Random Effect* (Widarjono, 2005).

3.3.3 Uji Statistik

a. Uji F Statistik

Uji F statistik akan menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh atau tidak secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{statistik} = \frac{R^2 / (K - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Hipotesis :

Ho : $b_1 = b_2 = 0$ artinya, secara simultan variabel independen GOV (pengeluaran pemerintah sektor pertanian), TK (tenaga kerja sektor pertanian), dan AGR (luas lahan sektor pertanian) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen PDRB.

Ha : $b_1 \neq b_2 \neq 0$ artinya, secara simultan variabel independen GOV (pengeluaran pemerintah sektor pertanian), TK (tenaga kerja sektor pertanian), dan AGR (luas lahan sektor pertanian) berpengaruh terhadap variabel dependen PDRB.

Kriteria pengujian :

1. Dengan tingkat toleransi (α) 5%, jika nilai $F_{statistik} > F_{tabel}$ atau nilai probabilitas $F_{statistik} <$ nilai probabilitas α maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, secara simultan variabel independen GOV (pengeluaran pemerintah sektor pertanian), TK (tenaga kerja sektor pertanian), dan AGR (luas lahan sektor pertanian) mempengaruhi variabel dependen PDRB.
2. Dengan tingkat toleransi (α) 5%, jika nilai $F_{statistik} <$ nilai probabilitas α maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya, secara simultan variabel independen GOV (pengeluaran pemerintah sektor pertanian), TK (tenaga kerja sektor pertanian), dan AGR (luas lahan sektor pertanian) tidak mempengaruhi variabel dependen PDRB.

b. Uji t Statistik

Uji t statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri (parsial), diuji dengan rumus:

$$t_{statistik} = \frac{b_i - \beta_i}{Sb_i}$$

Hipotesis :

Ho : $b_1 = b_2 = 0$ artinya, secara parsial variabel independen GOV dan TK tidak berpengaruh terhadap variabel dependen PDRB.

Ha : $b_1 \neq b_2 \neq 0$ artinya, secara parsial variabel independen GOV, TK, AGR berpengaruh terhadap PDRB.

Kriteria pengujian :

1. Dengan tingkat toleransi (α) 5%, jika nilai $t_{statistik} > t_{tabel}$ atau nilai probabilitas $t_{statistik} < \alpha$ maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, secara parsial variabel independen GOV (pengeluaran pemerintah sektor pertanian), TK (tenaga kerja sektor pertanian), dan AGR (luas lahan sektor pertanian) mempengaruhi variabel dependen PDRB.
2. Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika nilai $t_{statistik} < t_{tabel}$ atau nilai probabilitas $t_{statistik} > \alpha$ maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya, secara parsial variabel independen GOV (pengeluaran pemerintah sektor pertanian) , TK (tenaga kerja sektor prtanian), AGR (luas lahan pertanian) tidak mempengaruhi variabel dependen PDRB.

c. Uji R^2 Koefisien Determinan

Koefisien determinan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu dengan menghitung koefisien R^2 . Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Semakin mendekati 1 maka semakin baik, karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati angka nol maka kurang mampu menjelaskan model. Koefisien determinasi hanyalah konsep statistik. Sebuah regresi baik jika nilai R^2 tinggi dan sebaliknya bila R^2 rendah regresi kurang baik. Tetapi, dalam kasus khusus variabel independen (X) mungkin

bukan variabel yang menjelaskan dengan baik terhadap variabel dependen (Y) walaupun kita percaya bahwa X mampu menjelaskan Y.

3.3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik Model regresi linier berganda (multiple regression) dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi Kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). BLUE dapat dicapai bila memenuhi Asumsi Klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari sebagai berikut :

1. Uji normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Konsep pengujian ini menggunakan pendekatan Jarque-berra test(JB-test). Pedoman dari JB-test adalah:

1. Bila nilai $J_{hitung} > \text{nilai } X^2 \text{ tabel}$ atau nilai probabilitas $J_{hitung} < \text{nilai probabilitas } (\alpha=5\%)$, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, error term adalah berdistribusi normal ditolak;
2. Bila nilai $J_{hitung} < \text{nilai } X^2 \text{ tabel}$ nilai probabilitas $J_{hitung} > \text{nilai probabilitas } (\alpha=5\%)$, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual error term adalah terdistribusi normal (Wardhono, 2004).

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Tepatnya istilah multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti dan istilah kolinearitas berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linear. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau

independen. Menurut Gujarati (2012) untuk mengetahui terjadinya multikolinieritas dapat dideteksi melalui:

1. Nilai R^2 tinggi (mendekati 1), tetapi tidak ada variabel bebas yang signifikan.
2. Dimana bila nilai R^2 regresi parsial masing-masing variabel bebas lebih besar dari R^2 model utama maka terjadi multikolinieritas.

Multikolinieritas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan nilai matrik korelasi untuk mendeteksi adanya multikolinieritas.

Apabila nilai matrik korelasi melebihi 80% maka variabel-variabel bebasnya memiliki hubungan yang tinggi dan cenderung terkena multikolinieritas (Gujarati, 1999).

3. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2005), uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya), dimana jika terjadi korelasi dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series).

4. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa nilai residual (disturbance term) yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homoskedastisitas, atau dengan kata lain varians dari residual adalah sama. Jika varians dari residual tidak sama, maka akan muncul permasalahan yang disebut dengan heteroskedastisitas. Permasalahn heteroskedastisitas tidak menyebabkan model menjadi bias, namun menyebabkan model tidak lagi mempunyai varians yang efisien atau yang minimum. Hal ini menyebabkan asumsi best dalm BLUE tidak dapat tercapai. Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak dalam sebuah model, dapat dilakukan dengan

menggunakan Uji Glajser. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier adalah dengan melihat Nilai Prob. F-statistic (F hitung). Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka H_0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka H_0 ditolak yang artinya terjadi heteroskedastisitas.

3.4 Definisi Variabel Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian merupakan variabel dependen didalam penelitian ini. Sedangkan variabel independennya adalah pengeluaran pemerintah sektor pertanian, dan tenaga kerja. Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga Konstan

PDRB menurut BPS merupakan penjumlahan nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi, di suatu wilayah tertentu (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud mulai kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa (dalam satuan rupiah). PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan yaitu PDRB yang dihitung berdasarkan harga pada waktu tertentu (tahun dasar), dimana saat ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. Data PDRB dalam penelitian ini diperoleh dari BPS tahun 2010-2015, variabel PDRB dinyatakan dalam miliaran rupiah.

b. Pengeluaran pemerintah sektor pertanian

Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian merupakan besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian, dalam pembelian barang maupun jasa pada sektor pertanian. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian ditunjukkan dengan jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan untuk sektor pertanian melalui APBN atau APBD. Dalam penelitian ini data pengeluaran

pemerintah diperoleh dari APBD tahun 2010-2015 di masing-masing Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur dan variabel pengeluaran pemerintah dinyatakan dalam miliaran rupiah.

c. Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja atau penduduk yang bekerja dan masuk dalam angkatan kerja dalam penelitian ini yaitu penduduk yang berusia 15 tahun keatas pada sektor pertanian. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam penelitian ini data tenaga kerja di sektor pertanian berusia 15 tahun ke atas didapat dari Kabupaten dan Kota Dalam Angka tahun 2010-2015 yang menggambarkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Variabel tenaga kerja dinyatakan dalam jiwa.

d. Luas Lahan Sektor Pertanian

Luas lahan adalah areal/tempat yang digunakan untuk melakukan usaha tani diatas sebidang tanah, yang diukur dalam satuan hektar (ha). Yang ditujukan untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak, lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya utama pada usaha pertanian. Dalam penelitian ini data luas lahan pertanian didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. Variabel luas lahan dinyatakan dalam hektar are atau (ha).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian, tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dan luas lahan sektor pertanian terhadap peningkatan PDRB wilayah Jawa Timur. Dalam penelitian ini telah dilakukan proses estimasi model dan interpretasi model dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan model *fixed effect*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV hasil analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pertanian (GOV), tenaga kerja sektor pertanian (TK), dan luas lahan sektor pertanian (AGR) terhadap PDRB provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015, maka dapat disimpulkan:

1. Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB provinsi Jawa Timur.
2. Tenaga kerja di sektor pertanian berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB provinsi Jawa Timur.
3. Luas lahan sektor pertanian berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB provinsi Jawa Timur.

5.2 Saran

1. Untuk mengembangkan pertanian yang ada di Jawa Timur, pemerintah perlu meningkatkan pengeluaran di sektor pertanian dengan tujuan agar pertanian di Jawa Timur lebih baik lagi. Dimana pembangunan di sektor pertanian itu sendiri berupa program pemberdayaan di sektor pertanian, program pembangunan infrastruktur pertanian, dan program teknologi pertanian yang masih kurang memadai di daerah Jawa Timur. Dengan melihat bahwa sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang banyak diminati oleh masyarakat dengan adanya peningkatan pengeluaran sektor pertanian oleh pemerintah maka diharapkan sektor pertanian berkembang pesat dan mampu menjadi penggerak perekonomian di wilayah Jawa Timur. Mulai proses

pembangunan sampai perawatannya perlu diperhatikan dengan alokasi dana yang tepat sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan jangka panjang.

2. Melihat banyaknya masyarakat yang berminat terhadap pekerjaan di bidang sektor pertanian, disini pemerintah diharapkan memperhatikan kualitas dari sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian dengan melakukan pengembangan pada tenaga kerja di sektor pertanian. Kemandirian dan penguasaan terhadap teknologi pertanian harus dimiliki oleh masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Sehingga tenaga kerja sektor pertanian tidak hanya bertambah pada sisi jumlah saja melainkan juga kualitas yang dimiliki para pekerja di sektor pertanian.
3. Luas lahan yang ada di wilayah Jawa Timur yaitu, dimana lahan yang digunakan untuk pertanian semakin lama semakin berkurang hal ini dikarekan banyaknya pembangunan diluar sektor pertanian yang dilakukan sehingga mengakibatkan lahan untuk pertanian semakin berkurang. Hal ini juga perlu perhatian dari pemerintah seperti adanya kebijakan pemanfaatan lahan yang sudah kritis untuk dijadikan perumahan, dikarenakan lahan pertanian merupakan media yang penting bagi petani untuk melakukan kegiatan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jazuli Rahman, 2016. *Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*. Jurnal Ekonomi Pembangunan vol. 14, No. 02, Universitas Muhammadiyah Malang.
- APBD Provinsi Jawa Timur, 2010-2015. *Pengeluaran Pemerintah*. Katalog APBD. Jawa Timur: APBD Provinsi Jawa Timur.
- Arsyad, dalam Azzumar, 2011. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi*. Daerah Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2010-2015. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur*. Katalog BPS. Jawa Timur: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik, tahun 2010-2015. *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur*. Katalog BPS. Jawa Timur: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Jumlah Penduduk yang Bekerja di Berbagai Sektor Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Timur*. Katalog BPS. Jawa Timur: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik, 2010-2015. *Luas Lahan Sawah, Tegal atau Kebun, Ladang Atau Huma, dan Lahan Sementara*. Katalog BPS. Jawa Timur: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Djojohadikusumo, (1993:44). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar-dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Pustaka LP3ES.
- Dumairy, 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Dumairy, 1999. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga.
- Dumairy, 2002. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*, Edisi Pertama, Terjemahan oleh Sumarno Zain, Penrbit Erlangga, Jakarta.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics*. Fourth Edition. New York: McGraw-Hill.
- Gujarati, Damodar. 2004. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta, Erlangga.

- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Buku 1 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Heliati, Ratni Yovino Dwiputra, 2016. *Agricultural Sector Investment on Gross Domestic Regional Product (GDRP) in West Java 2007-2012*. Trikonomika vol. 15, no. 1, Universitas Padjajaran.
- Kristiana, Puspita Yana, 2014. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Kebijakan RENSTRA Terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah*. Economics Development Analysis Journal vol. 04 No. 04, Universitas Negeri Semarang.
- Kusumayani, Ika, 2005. *Perubahan Penggunaan Lahan dan Sosial Budaya Dari Pertanian ke Non Pertanian di Kota Gede Yogyakarta*. Jurnal Manajemen Agribisnis. vol. 3, no. 2, Universitas Gadjah Mada.
- Mankiw Gregory, N, 2012. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Asia*. Salemba empat. Jakarta.
- Rosyidi, Suherman, 2012. *Pengantar Teori Ekonomi. Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Singarimbun, M., dan Effendi, S. 1995. *Metode Penelitian Survei I*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Salqaura, Siti Sabrina Jangkung Handoyo Mulyo Dwidjono Hadi Darwanto, 2018. *The Influence of Fiscal Policy on Agriculture Sector in Java Island*. Agro Ekonomi vol.x, no. x, xxxx, Universitas Gadjah Mada.
- Sukirno, S, 2004. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta : Jakarta Press.
- Suwanti, Edy Yusuf Agung Gunantov, 2013. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010*. Journal Of Economic vol. 02- No. 04, Universitas Diponegoro.
- Sarwono, 2016. *Analysis of Economic Growth Factors in West Pantura Areas of Central Java*. Journal of Economics and Policy vol. 9, no. 145-158, Universitas Negeri Semarang.
- Savira, Evi, 2018. *Pengaruh PMDN, PMDA, Tenaga Kerja dan Luas Lahan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Aceh*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 4 Nomor 1, Universitas Syiah Kuala.

- Sitaniapessy, Harry A.P, 2012. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan APBD di Kabupaten Maluku Tengah*. Journal *Economia* Vol.09-No.38-55, Politeknik Negeri Ambon.
- Taufiq, M, 2016. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Wilayah EKS Karesidenan Besuki*. Artikel Ilmiah Mahasiswa, Universitas Jember.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, (2000:21). *Pembangunan Ekonomi* Jilid 1 Erlangga. Jakarta.
- Widarjono, Agus, 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasinya*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.
- APBD. 2010-2015. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur. <http://APBDJatim.bps.go.id>, diunduh tanggal 20 A Maret 2018.
- BPS. 2010-2017. Laju Pertumbuhan Ekonomi. <http://Indonesia.bps.go.id>, diunduh tanggal 10 Maret 2018.
- BPS. 2010-2015. PDRB Provinsi Jawa Timur. <http://Jatim.bps.go.id>, diunduh tanggal 15 Maret 2018.
- BPS. 2010-2017. Tenaga Kerja Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur. <http://Jatim.bps.go.id>, diunduh tanggal 1 Agustus 2018. 15 Maret 2018.
- BPS. 2010-2017. Luas Lahan Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur. <http://Jatim.bps.go.id>, diunduh tanggal 16 Maret 2018. 15 Agustus 2018.

LAMPIRAN

Lampiran A.

Data Log PDRB, Log Pengeluaran Pemerintah, Log Tenaga Kerja, Log Luas Lahan Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015

Kabupaten/Kota	PDRB	GOV	TK	AGR
Kab. Pacitan	11.12982	20.89989	12.23713	11.11614
	11.19082	26.03772	12.32782	11.08708
	8.949625	23.26536	12.2185	11.15122
	11.30929	23.30425	12.36291	11.07279
	9.057422	23.65443	12.34087	11.06773
Kab. Ponorogo	11.40973	23.81629	12.21488	11.06482
	11.40328	16.0791	12.5188	11.21162
	11.4587	23.36637	12.36134	11.21073
	11.51676	18.77779	12.45216	11.19733
	11.56689	16.96796	12.42345	11.16108
Kab. Trenggalek	11.61769	23.92402	12.47374	11.16125
	11.66889	19.58308	12.41305	11.19423
	11.28503	23.53845	12.29022	10.56512
	11.34275	23.712	12.32208	10.55506
	11.40305	28.5356	12.33449	10.48452
Kab. Tulungagung	11.46128	23.93411	12.30565	10.58926
	9.20984	24.21029	12.28151	9.632925
	11.56187	21.91493	12.24875	10.27622
	12.03031	27.36002	12.26419	10.74531
	12.09207	23.42821	12.35827	10.85792
Kab. Blitar	9.852142	28.05812	12.32234	10.84523
	12.21425	21.52459	12.34765	10.98832
	12.26741	21.63762	12.30412	10.95869
	12.31612	17.02673	12.16247	11.04575
	11.99621	22.40419	12.5188	11.23996
Kab. Kediri	12.04906	27.76351	1236134	11.24074
	12.10374	23.24166	1245216	11.17003
	12.15306	27.31901	1242345	11.26681
	12.20207	20.94275	1247374	11.26343
	12.25131	18.49317	1241305	11.23938

	12.17329	8.602453	12.47431	11.1387
	12.23263	15.58063	12.51336	10.57647
	12.2892	18.03132	12.44985	11.13354
	10.03846	20.50477	12.42499	11.09354
	12.38871	16.11124	12.54724	11.06319
Kab. Malang	12.93224	19.05409	13.05094	11.90606
	12.9966	22.71886	13.15604	11.90547
	10.75952	24.13769	13.21542	11.91863
	13.11376	19.41483	13.16242	11.86822
	13.17211	24.62991	13.14922	11.87119
	13.22344	24.43733	12.9077	11.84684
Kab. Lumajang	11.86781	23.40189	12.34864	11.41692
	11.92797	16.97328	12.40954	11.41767
	11.98626	16.97328	12.44704	11.3811
	9.737787	23.93174	12.35638	11.40878
	12.09245	23.82631	12.46446	11.41021
	12.13763	21.81022	12.34868	11.42148
Kab. Jember	12.71816	22.99345	13.28022	11.67706
	12.77162	23.8072	13.31061	11.62325
	10.52573	23.78595	13.17391	11.53996
	12.88713	24.05776	12.99073	11.60825
	12.94734	24.11195	13.12325	11.60982
	12.99958	24.25049	13.15563	11.62762
Kab. Banyuwangi	12.69047	23.80737	12.77593	11.48891
	12.75767	23.6907	12.60405	11.48501
	12.82761	24.22656	12.63165	11.36192
	12.89254	22.08627	12.54581	11.46511
	12.94815	24.54882	12.47199	11.48757
	13.0065	15.26169	12.8462	11.31774
Kab. Bondowoso	11.35228	20.93924	12.34164	11.09758
	9.10864	23.42538	12.28258	11.08408
	11.47037	19.39694	12.13803	11.20477
	11.52684	23.77815	11.98584	11.06887
	11.57613	19.37367	12.01965	11.03124
	11.62443	19.29278	12.36526	11.03768
Kab. Situbondo	11.34704	25.65742	11.9672	11.0704
	11.39943	23.7635	12.01601	11.07625
	11.45228	23.61786	11.98884	11.15349
	11.51231	24.18297	12.02705	11.08248
	11.56859	24.34127	11.79508	11.07602
	9.313483	23.99466	12.00132	11.05774
Kab. Probolinggo	9.617677	16.0791	12.77803	11.39057

	9.67486	23.36637	12.72639	11.38249
	9.737244	18.77779	12.68227	11.5123
	9.787454	16.96796	12.65641	11.3758
	9.835326	23.92402	12.57875	11.36342
	9.881804	19.58308	12.71541	11.35909
Kab. Pasuruan	11.02155	28.16587	12.40167	11.35036
	11.08631	9.89968	12.57673	11.35617
	11.15863	23.84896	12.39755	11.32471
	11.22583	23.8953	12.46653	11.36345
	11.2911	28.63205	12.3906	11.36359
	11.34351	22.204	12.09258	11.34606
Kab. Sidoarjo	11.30802	23.17206	11.34945	10.09394
	11.3761	23.42635	11.02949	10.05479
	11.44619	18.92516	10.85898	7.900822
	11.51285	23.69187	11.11452	10.02548
	11.57528	14.59911	11.0292	10.01633
	11.62637	23.91462	11.07671	9.778151
Kab. Mojokerto	10.43843	20.76857	11.85718	10.63734
	10.50248	24.41064	11.6442	10.6333
	10.57253	23.79094	11.70002	10.64768
	10.63606	16.83698	11.61997	10.66663
	10.69856	16.97764	11.54826	10.60609
	10.75347	24.12661	11.64592	10.60842
Kab. Jombang	9.761394	23.50291	12.26767	10.88273
	9.81929	23.63689	12.07974	10.88425
	9.878928	23.7899	11.97193	10.88216
	9.93655	23.89609	11.91871	10.8899
	9.989353	24.80653	11.87584	10.89529
	10.04152	23.89736	12.04278	10.86788
Kab. Nganjuk	9.341842	19.01579	12.43484	10.86676
	9.397749	23.94164	12.25601	10.86611
	9.454619	24.0104	12.37532	10.99798
	9.50718	24.42786	12.27712	11.00187
	9.556968	24.57745	12.25655	11.02604
	9.607464	23.90995	12.30094	10.98139
	9.002048	23.28872	12.01713	10.59583
Kab. Madiun	9.060529	28.19239	12.02395	10.60316
	9.119945	23.98843	11.9743	10.59555
	9.175138	23.7941	11.87888	10.62779
	9.227168	23.66064	12.01406	10.62956
	9.278457	23.67975	11.85015	10.68737
	9.021333	21.24034	12.07966	10.46102

Kab. Magetan	9.076215	23.84479	11.9769	10.51001
	9.132509	24.13934	11.90748	10.4838
	9.189382	21.9613	11.83706	10.47993
	9.239093	24.59001	11.93183	10.50876
	9.289512	29.09123	11.84105	10.51496
Kab. Ngawi	9.042714	17.63621	12.44575	11.03453
	9.102009	22.47711	12.40425	11.07699
	9.1662	20.16085	12.40938	11.06585
	9.219696	28.19524	12.343	11.10294
	9.276222	12.366	12.34158	11.08646
Kab. Bojonegoro	9.325729	28.70797	12.2673	11.09856
	10.41307	23.84187	12.81258	11.69515
	10.51192	24.04367	12.74273	11.69074
	10.54892	24.22499	12.80882	11.67178
	10.57233	24.67427	12.77963	11.67836
Kab. Tuban	10.595	24.78886	12.81645	11.67735
	10.75562	24.64757	12.52094	11.64322
	10.2406	23.90244	12.70003	11.70505
	10.30676	24.01816	12.57402	11.70821
	10.36773	28.65267	12.57378	11.71992
Kab. Lamongan	10.42462	24.12486	12.57107	11.76323
	10.47785	24.50797	12.38536	11.73998
	10.52557	24.49352	12.52716	11.74048
	9.697398	19.00899	12.70788	11.65324
	9.761953	23.81791	12.5699	11.65418
Kab. Gresik	9.828909	19.35986	12.601	16.27338
	9.895899	19.69223	14.64308	11.66262
	9.957024	19.53765	12.47189	11.65495
	10.0131	19.84091	12.5685	11.67298
	10.98645	16.92174	11.7811	11.08043
Kab. Bangkalan	11.04928	9.793114	11.52195	10.19358
	11.11615	16.41691	11.44692	13.35082
	11.17485	16.63519	11.42024	11.04975
	11.2429	21.69223	11.49502	11.07024
	11.30664	21.79646	11.34979	11.05969
Kab. Sampang	9.672904	22.95477	12.46364	11.47333
	9.705433	9.247925	12.43851	11.47332
	9.691142	23.16139	12.57755	16.19336
	9.693013	23.37089	12.62919	11.44531
	9.762454	23.57751	12.50842	11.43091
Kab. Sampang	9.735471	23.61875	12.60957	11.427
	9.21672	22.6886	12.65201	11.52556
Kab. Sampang	9.241384	21.30386	12.59115	11.52143

	9.297518	22.77057	12.65443	16.35352
	9.36081	23.72261	12.54464	11.52169
	9.361593	23.87578	12.54701	11.52141
	9.382149	23.74272	12.48239	11.52332
Kab. Pamekasan	8.852837	27.78264	12.54184	10.92426
	8.9132	20.95567	12.78706	11.043
	8.973858	28.1075	12.76928	15.79897
	9.03303	27.97434	12.78692	11.05464
	9.087743	14.32782	12.61447	11.06032
	9.139585	23.68267	12.46653	11.06399
Kab. Sumenep	9.624864	23.70245	12.89585	11.87213
	9.684386	23.33148	13.14033	11.87098
	9.779341	23.49029	13.12028	16.45424
	9.914334	23.54479	13.0841	11.92474
	9.974733	24.05476	13.06387	11.91524
	9.987397	15.02653	12.80335	11.91606
Kota Kediri	10.96042	17.80402	9.005405	7.592366
	11.00243	8.633909	8.000349	7.586296
	11.05382	15.58063	8.211483	12.37837
	11.08841	18.03132	7.173958	7.451822
	11.14523	20.50477	8.000349	8.933005
	11.19747	16.11124	8.516193	7.360104
Kota Blitar	7.956827	22.40419	8.48529	7.072422
	8.019086	27.76351	8.92811	7.066467
	8.082279	23.24166	8.834919	11.32942
	8.145202	27.31901	8.685416	7.051856
	8.202373	20.94275	8.837826	7.037906
	8.257619	18.49317	8.772765	7.031741
Kota Malang	10.35384	24.36759	8.945724	7.890957
	10.41252	22.87608	8.373785	7.890957
	10.47321	26.98187	8.493515	12.70743
	10.53337	27.24052	8.547916	7.854769
	10.58973	8.891787	8.959055	7.839526
	10.64428	8.958926	8.985946	7.814803
Kota Probolinggo	8.501328	27.44241	8.910586	7.819636
	8.559083	22.61999	9.053453	7.815611
	8.621932	20.7271	8.839422	12.74681
	8.684621	27.65076	8.634621	7.802209
	8.742239	23.4163	9.016149	7.777374
	8.799179	28.06394	8.95157	7.8018
Kota Pasuruan	8.184625	22.16198	7.734559	7.411556
	8.245568	22.24935	8.472405	7.403061
	8.306768	22.81761	8.475538	12.20604

	8.369876	23.00897	8.424859	7.379008
	8.425363	23.05666	8.580919	7.374002
	8.479138	23.01829	8.667852	7.351158
Kota Mojokerto	8.002092	19.41605	6.380123	6.594413
	8.060098	21.99856	7.758761	6.580639
	8.11922	19.43337	7.299797	10.83096
	8.179396	19.49348	7.093405	6.570883
	8.23605	15.24159	7.2086	6.476972
Kota Madiun	8.291897	20.40566	7.130899	6.455199
	8.712957	15.03435	7.847763	7.183871
	8.778696	22.10243	8.103797	7.183871
	8.844726	15.2981	8.027803	11.515
	8.918744	15.68598	7.6912	6.964136
	8.98285	16.4095	8.073715	6.951772
Kota Surabaya	9.042561	16.10405	7.835975	6.946014
	12.35106	24.61223	9.240579	8.022897
	12.41992	24.03394	8.928243	8.056744
	12.49085	24.31697	8.675051	12.75311
	12.56392	24.06636	9.705829	8.364508
	12.63117	21.38003	9.523471	7.803843
	12.68916	21.82241	9.184304	8.187299
Kota Batu	8.780234	23.17346	10.42798	9.011889
	8.849084	23.30254	10.34029	8.976768
	8.919132	21.01111	10.21387	13.33906
	8.989519	23.79934	10.34516	8.379309
	9.056268	23.73622	10.41214	8.241967
	9.121061	23.77007	10.22575	8.241967

Lampiran B

B.1 *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: LOGPDRB

Method: Panel Least Squares

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 37

Total panel (balanced) observations: 222

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGGOV	0.638163	0.175812	0.944214	0.0004
LOGTK	-0.811593	0.159132	-5.100126	0.0000
LOGAGR	0.110184	0.116942	0.942214	0.3475
C	11.94607	1.664408	7.177367	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.725862	Mean dependent var	10.30412
Adjusted R-squared	0.665316	S.D. dependent var	1.371315
S.E. of regression	0.793331	Akaike info criterion	2.540281
Sum squared resid	102.5881	Schwarz criterion	3.150470
Log likelihood	-217.0281	Hannan-Quinn criter.	2.787215
F-statistic	11.98864	Durbin-Watson stat	1.866106
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran C.

C.1 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.657215	(33,163)	0.0000
Cross-section Chi-square	216.709321	33	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOGPDRB

Method: Panel Least Squares

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 37

Total panel (balanced) observations: 222

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGGOV	0.230024	0.137009	1.678892	0.0948
LOGTK	-0.329897	0.194307	-1.697809	0.0911
LOGAGR	0.630691	0.202186	3.119357	0.0021
C	5.399283	1.169390	4.617179	0.0000
R-squared	0.189883	Mean dependent var		10.30412
Adjusted R-squared	0.177483	S.D. dependent var		1.371315
S.E. of regression	1.243683	Akaike info criterion		3.293828
Sum squared resid	303.1623	Schwarz criterion		3.359794
Log likelihood	-325.3828	Hannan-Quinn criter.		3.320523
F-statistic	15.31347	Durbin-Watson stat		0.633660
Prob(F-statistic)	0.000000			

C.2 Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.873258	3	0.0031

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOGGOV	0.638163	0.788372	0.004861	0.0312
LOGTK	-0.811593	-0.667577	0.002298	0.0027
LOGAGR	0.110184	0.176226	0.001273	0.0642

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOGPDRB

Method: Panel Least Squares

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 37

Total panel (balanced) observations: 222

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.94607	1.664408	7.177367	0.0000
LOGPDRB	0.638163	0.175812	3.629798	0.0004
LOGTK	-0.811593	0.159132	-5.100126	0.0000
LOGAGR	0.110184	0.116942	0.942214	0.3475

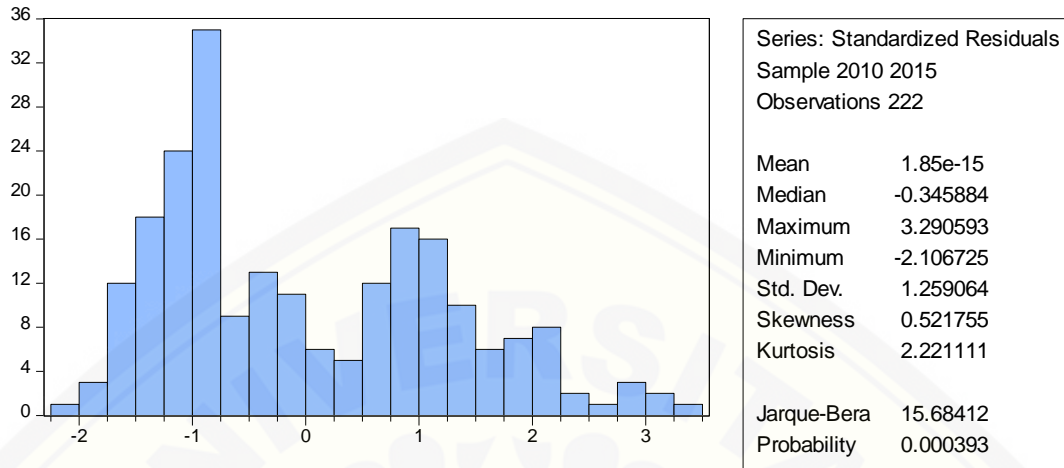
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.725862	Mean dependent var	10.30412
Adjusted R-squared	0.665316	S.D. dependent var	1.371315
S.E. of regression	0.793331	Akaike info criterion	2.540281
Sum squared resid	102.5881	Schwarz criterion	3.150470
Log likelihood	-217.0281	Hannan-Quinn criter.	2.787215
F-statistic	11.98864	Durbin-Watson stat	1.866106
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran D.

D.1 Uji normality test



D.2 Uji Multikolinearitas

	GOV	TK	AGR
GOV	1.000000	0.037185	0.046991
TK	0.037185	1.000000	0.685393
AGR	0.046991	0.685393	1.000000

D.3 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.599145	Prob. F(2,161)	0.5505
Obs*R-squared	1.233763	Prob. Chi-Square(2)	0.5396

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Sample: 2 222

Included observations: 221

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(GOV)	-2.97E-11	5.15E-09	-0.005769	0.9954
D(TK)	0.000438	0.018022	0.024313	0.9806
D(AGR)	4.82E-05	0.001472	0.032724	0.9739
C	0.039489	4013.926	9.84E-06	1.0000
RESID(-1)	-0.077785	0.078808	-0.987018	0.3251
RESID(-2)	0.030978	0.078911	0.392569	0.6952
R-squared	0.007388	Mean dependent var		-9.29E-13
Adjusted R-squared	-0.023439	S.D. dependent var		51273.47
S.E. of regression	51870.88	Akaike info criterion		24.58617
Sum squared resid	4.33E+11	Schwarz criterion		24.69819
Log likelihood	-2046.945	Hannan-Quinn criter.		24.63164
F-statistic	0.239658	Durbin-Watson stat		1.996436
Prob(F-statistic)	0.944404			

D.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.355562	Prob. F(3,164)	0.7852
Obs*R-squared	1.085642	Prob. Chi-Square(3)	0.7805
Scaled explained SS	4.566405	Prob. Chi-Square(3)	0.2064

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Sample: 1 222

Included observations: 222

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.74E+09	1.78E+09	4.348089	0.0000
GOV^2	-7.21E-16	9.85E-16	-0.731898	0.4653
TK03^2	0.000654	0.004228	0.154617	0.8773
AGR04^2	-5.13E-05	7.11E-05	-0.721851	0.4714
R-squared	0.006462	Mean dependent var		7.36E+09
Adjusted R-squared	-0.011712	S.D. dependent var		2.19E+10
S.E. of regression	2.21E+10	Akaike info criterion		50.49469
Sum squared resid	7.97E+22	Schwarz criterion		50.56907
Log likelihood	-4237.554	Hannan-Quinn criter.		50.52488
F-statistic	0.355562	Durbin-Watson stat		0.402952
Prob(F-statistic)	0.785175			